



**LAPORAN**

**LOKAKARYA  
NASIONAL  
PEMBAURAN  
PENDIDIKAN**

26 - 28 OKTOBER 1981, Orchid Palace Hotel - JAKARTA

**BUKU 2  
(BAHAN PERSIDANGAN)**

XI. 301

PROYEK ASIMILASI DI BIDANG PENDIDIKAN DAN  
PENGATURAN PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jakarta, 1981



370.1  
LAP  
1

**L A P O R A N**

**LOKAKARYA  
NASIONAL  
PEMBAURAN  
PENDIDIKAN**

26 – 28 OKTOBER 1981, Orchid Palace Hotel – JAKARTA

**BUKU 2  
(BAHAN PERSIDANGAN)**

PROYEK ASIMILASI DI BIDANG PENDIDIKAN DAN  
PENGATURAN PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jakarta, 1981

## KATA PENGANTAR

Masalah pembauran pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak masalah-masalah pendidikan yang dihadapi Pemerintah. Karena problematik ini tidak terbatas pada bidang persekolahan saja, tetapi juga menyangkut sektor lain, maka Proyek Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengadakan lokakarya pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 1981 dengan mengikutsertakan kalangan yang agak diperluas dan tidak terdiri dari unsur-unsur pendidikan semata-mata. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dalam lokakarya ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak tugas pekerjaan yang harus dilakukan, kalau cita-cita pembauran pendidikan sebagai bagian dari cita-cita kesatuan bangsa, ingin cepat diwujudkan.

Mengingat bahwa forum lokakarya ini dianggap telah dapat mewakili berbagai kalangan yang bersangkutan dengan masalah ini, baik unsur-unsur eksekutif, unsur penelitian dan ilmu pengetahuan, unsur-unsur praktisi sekolah-sekolah (swasta) dan unsur-unsur sosial politis, kiranya apa yang diperoleh dari lokakarya tersebut cukup mencerminkan problem-problem riil, yang masih perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Laporan ini terdiri dari 2 buku, buku 1 berisi hasil persidangan dan buku 2 berisi kumpulan makalah yang disampaikan oleh para penceramah.

Semoga bermanfaat kiranya.

Jakarta, 28 Oktober 1981

Pemimpin Proyek Asimilasi di Bidang  
Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan

Asing di Indonesia



Drs. Sardjono Sigit  
NIP : 130128218

DAFTAR ISI BUKU 1  
( Hasil Persidangan )

- Kata Pengantar	
1. Kesimpulan hasil Lokakarya Nasional Pembauran Pendidikan	Hal. 1 - 3
2. Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Hal. 4 - 6
3. Pengarahan Direktur Jenderal Pendi- dikan Dasar dan Menengah	Hal. 7 - 14
4. Hasil Sidang Kelompok I	Hal. 15 - 18
5. Hasil Sidang Kelompok II	Hal. 19 - 23
6. Hasil Sidang Kelompok III	Hal. 24 - 32

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Laporan Ketua Panitia Penyelenggara	Hal. 33 - 35
- Pokok-pokok Notulen Diskusi	Hal. 36 - 50
- Pidato Penutupan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Hal. 51 - 54
- Press Release Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Hal. 55 - 56
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Pembantu Pelaksanaan Asimilasi dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia	Hal. 57 - 59
- SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penye- lenggaraan Lokakarya	Hal. 60 - 61
- SK Pimpinan Proyek Asimilasi tentang Susunan Panitia Penyelenggara	Hal. 62 - 64
- Daftar Peserta Lokakarya Nasional Pembauran Pendidikan	Hal. 65 - 69

---

DAFTAR ISI BUKU 2  
( Bahan Persidangan )

1. PRAPTO PRAJITNO  
(DIRJEN SOSPOL DEPDAGPI)      peranan pembauran pendidikan      Hal. 1 - 18  
dalam pembinaan kesatuan bangsa
  2. SUNARSO  
(KETUA BKNC-BAKIN)      pendidikan sebagai sarana      Hal.19 - 36  
pembangunan bangsa
  3. K. SINDHUNATA  
(PAKOM-PKB PUSAT)      pembauran di bidang pendidikan      Hal.37 - 41
  4. A. SUDIHARTO DJIMANDONO  
( CSIS )      pembauran pendidikan dalam      Hal.42 - 57  
rangka pembinaan kesatuan bangsa
  5. NELY G. TAN  
(LEKNAS-LIPI)      pembauran di bidang pendidikan      Hal.58 - 70  
suatu tinjauan sosiologis
  6. KI SOERATMAN  
(MPS PUSAT)      pembauran pendidikan melalui      Hal.71 - 84  
perguruan taman siswa
  7. TOENGGCOEL P. SIAGIAN      bhineka tunggal ika :      Hal.85 - 109  
potensi dan keterbatasan lembaga  
pendidikan dalam proses pembauran
-

**PERANAN PEMBAURAN PENDIDIKAN  
DALAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA**

oleh ;  
**Prapto Prajitno**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK ASIMILASI  
DIBIDANG PENDIDIKAN DAN PENGATURAN  
PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

**1981**

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERANAN PEMBAURAN PENDIDIKAN  
DALAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA

(Uraian Direktur Jenderal Sosial Politik pada Lokakarya Pembauran Pendidikan Oktober 1981 di Jakarta)

I. PENDAHULUAN

1. Pertama-tama kami menyambut gembira atas kesempatan untuk menyajikan suatu uraian pada Lokakarya Pembauran Pendidikan ini, karena beberapa hal antara lain :
  - a. Saatnya kami anggap tepat, dimana pada bulan Oktober 1981 ini kita mencatat paling sedikit 2 peristiwa penting bagi kehidupan kebangsaan Indonesia, yaitu Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Sumpah Peruda;
  - b. Telah selesainya pelaksanaan program Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan Pekan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa bulan September 1981 dengan thema yang sejalan, yaitu pembauran bidang ekonomi.
2. Lokakarya semacam ini telah pula diselenggarakan di Semarang pada akhir bulan September 1979 yang lalu, dimana pada waktu itu Departemen Dalam Negeri menyumbangkan pemikirannya dalam makalah yang berjudul "Segi-segi politik dalam pelaksanaan pembauran pendidikan". Oleh karena itulah permintaan Saudara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K dengan suratnya No. 6635/C/C-1981 tanggal 26 September 1981 untuk menyiapkan makalah dalam penyajian ini kami penuhi dengan judul "Peranan Pembauran Pendidikan Dalam Pembinaan Kesatuan Bangsa" dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

a. Dunia

- a. Dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis bagi penentuan corak masyarakat bangsa Indonesia yang dicita-citakan;
  - b. Dalam pembinaan kesatuan bangsa Indonesia menuju terwujudnya cita-cita Sumpah Pemuda dan Mawasan Nusantara sebagai salah satu wujud pengamalan Pancasila, jelas kegiatan pembauran pendidikan sebagai bagian dari pembauran sosial budaya merupakan kegiatan yang sangat menopangnya;
  - c. Peranan pembauran pendidikan perlu lebih ditingkatkan karena sahananya yang besar bagi pembinaan kesatuan bangsa Indonesia.
3. Masalah persatuan dan kesatuan bangsa adalah masalah Nasional yang merupakan salah satu unsur pendukung strategis bagi suksesnya Pembangunan Nasional.
- Sedangkan proses menuju persatuan dan kesatuan bangsa itu telah berlangsung sejak lama yang dimulai dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai sekarang, sekalipun bentuk dan tahapan perjuangannya berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi.
4. Aspirasi persatuan dan kesatuan bangsa itu telah tersimpul dalam ikrar Sumpah Pemuda 1928, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan tercermin pula dalam Lambang Negara yang bersemboyan "Bhineka Tunggal Ika".
5. Wujud dari persatuan dan kesatuan yang dicita-citakan telah ditegaskan dalam Mawasan Nusantara GBHN yang dilukiskan sebagai bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya yang mendiami Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan Ekonomi dan kesatuan Hankam.
6. Adapun pembauran (assimilasi) khususnya pembauran pendidikan adalah merupakan salah satu proses untuk mempercepat peningkatan persatuan dan kesatuan Bangsa. Dalam hubungan ini pelaksanaan pembauran di bidang pendidikan bukan hanya menyangkut masalah sekolah formal saja, akan tetapi juga merupakan masalah bersama antara sekolah, keluarga dan masyarakat dengan bimbingan dan pengarahan dari Pemerintah.

7. Dalam



7. Dalam konteks yang dimaksud dengan pembauran adalah suatu proses penyatu-paduan unsur-unsur bangsa yang berbeda-beda asal keturunan, suku, bahasa, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME agar menjadi satu kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu kesatuan Bangsa yang secara psikologis harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.
8. Selanjutnya masalah Peranan Pembauran Pendidikan dalam Pembinaan Kesatuan Bangsa ini, akan diuraikan secara ringkas dengan urutan penguraian sebagai berikut :
  - a. Latar belakang sejarah;
  - b. Landasan dan Kebijakanaksanaan Pembauran;
  - c. Pengertian Pembauran;
  - d. Pembauran Pendidikan;
  - e. BAKOM PKB dan Team Assimilasi.

## II. LATAR BELAKANG SEJARAH

1. Untuk dapat memahami lebih mendalam akan kenyataan kenyataan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dalam hubungannya dengan pembauran dewasa ini, kiranya perlu ditelusuri kembali sejarah masa silam, karena masa kini adalah produk masa silam.
2. Apabila ditelusuri sejarah masa silam, kita akan menemukan bahwa proses perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mempunyai latar belakang sejarah yang panjang dan berliku-liku dan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, dimana jauh sebelumnya Bangsa Indonesia pernah bersatu, akan tetapi kemudian terpecah belah karena berbagai sebab.
3. Masa proses penyatuan kembali Bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang besar dan utuh memakan waktu panjang, yang diperoleh kembali dengan melalui proses yang penuh pengorbanan, penderitaan dan bahkan ditebus dengan darah. Berbagai usaha sporadis telah dicoba untuk mempersatukan kembali Nusantara ini, akan tetapi selalu mendapat hambatan dan rintangan. Sementara itu sistem penjajahan kolonial meningkat semakin ketat, sedangkan diantara sesama bangsa Indonesia sendiri terasa semakin jauh pertaliannya disebabkan oleh faktor-faktor geografis, historis, sosiologis dan sosial psikologis yang memang sengaja ditumbuhkan dan dibesar-besarkan oleh dan untuk kepentingan si penjajah.

4. Namun walaupun demikian, proses penyatuan kembali bangsa Indonesia itu ternyata bagaikan bayangan yang tidak dapat dibendung. Aspirasi persatuan dan kesatuan bangsa yang meningkat menjadi aspirasi Kemerdekaan semakin lama menjadi semakin kukuh kuat, sehingga dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya telah dapat mengimbangi kekuatan imperialisme modern yang tengah mencekam Bangsa Indonesia. Mula-mula usaha penyatuan kembali itu menampakkan diri antara lain dalam bentuk lahirnya Budi Utomo (tahun 1908), kemudian lahir Sumpah Pemuda (tahun 1928) dimana untuk pertama kalinya di ikrarkan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa - Indonesia. Jiwa persatuan dan kesatuan yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda itulah akhirnya yang mendorong terwujudnya Bangsa dan Negara Indonesia yang mencapai klimaksnya pada hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945.
5. Selama masa penjajahan itu banyak hal-hal yang sengaja ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah kolonial Belanda yang bersifat mempertajam perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat guna kepentingan politik dominasi penjajahannya, antara lain di bidang hukum Pemerintah Kolonial membagi penduduk menjadi tiga golongan, yaitu penduduk Eropa, penduduk Timur Asing (Vreemde Costerlingen) termasuk di dalamnya orang-orang Cina, dan terakhir penduduk Inlander (Pribumi).
6. Sebagai akibat pembedaan hukum berdasarkan pengelompokan penduduk itu, maka terdapat pembedaan perlakuan dalam segala bidang kehidupan yaitu :
  - a. Golongan penduduk Eropa mendapat hak dan perlakuan yang paling menguntungkan, antara lain :
    - Sebagai pegawai, mereka menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai dari golongan penduduk lainnya.
    - Hak cuti lebih mendapat perhatian dan bahkan diberi hak cuti ke Negeri Belanda.
    - Diadakan sekolah khusus yang tidak/sulit dimasuki oleh golongan lain.

- Jabatan-jabatan tinggi dan menengah dalam Pemerintahan terbuka lebar bagi mereka, akan tetapi tidak demikian halnya bagi golongan lain.

- b. Golongan penduduk Timur Asing (termasuk di dalamnya orang-orang Cina, Arab dan India) menduduki tempat nomor dua, dimana terhadap mereka diperlukan hukum perdata yang sama dengan golongan Eropa, sehingga dengan demikian mempermudah transaksi dagang antara pedagang-pedagang Timur Asing dengan pedagang Eropa.

Kenyataan ini menguntungkan golongan penduduk Cina dalam meningkatkan kehidupan perekonomian mereka, di samping mereka itu tergolong tekun dan ulet dalam berusaha.

Dalam kehidupan sosial, mereka tinggal pada lokasi pemukiman yang eksklusif yang lazim disebut "pecinan". Demikian juga mereka mengenal sekolah khusus bagi orang-orang Cina, seperti HCS (Hollands Chinese School) dan sebagainya.

- c. Penduduk bumi putera/puteri (inlander) adalah golongan penduduk yang menempati status paling rendah, karena merupakan penduduk yang dijajah, sehingga perkembangannya dihambat oleh pihak yang menjajah. Hal ini wajar karena sipenjajah berusaha memeras negeri jajahannya guna memperoleh keuntungan materiil sebanyak mungkin, dengan membiarkan rakyat menderita dalam kelaparan dan kebodohan.

Dalam usaha mengexploitasi kekayaan ini Pemerintah Belanda menjadikan golongan Timur Asing khususnya Cina sebagai "Buffer" nya.

7. Kenyataan sejarah ini tidak dapat begitu saja dihilangkan setelah tercapainya Kemerdekaan bahkan masih dirasakan akibatnya sampai sekarang, dimana walaupun semenjak Indonesia Merdeka pada prinsipnya tidak dikenal pembedaan penduduk seperti itu lagi dan formalnya hanya mengenal warga negara Indonesia dan orang asing, namun kenyataan sosial seperti disebutkan tadi masih sulit untuk dapat dihapuskan.

Sebagai .....

Sebagai contoh, usaha menghapuskan akibat negatif dari peninggalan masa penjajahan itu Pemerintah telah melakukan berbagai kebijaksanaan antara lain di bidang pendidikan sejak tahun 1968 Pemerintah telah mulai melakukan pembauran pendidikan dengan cara mendirikan sekolah-sekolah Nasional Proyek Khusus dan menghapuskan sekolah-sekolah yang bersifat eksklusif. Pelaksanaannya telah menunjukkan banyak kemajuan dimana SNPK-SMPK itu telah berubah menjadi Sekolah Nasional seperti sekarang ini, akan tetapi masih saja terdapat hambatan-hambatan yang kiranya akan dikaji dalam lokakarya ini.

8. Dengan memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia sekilas seperti disebutkan tadi serta memahami olur perjuangan bangsa Indonesia sampai pada periode sekarang ini, kiranya kita menjadi semakin dewasa untuk memahami titik-titik tolak orientasi bagi perjuangan selanjutnya dalam usaha mencapai tujuan nasional.

### III. LANDASAN DAN KEBIJAKSANAAN PEMBAURAN

1. Sebagai negara kesatuan yang berdasarkan hukum, maka Undang-Undang Dasar 1945, baik Pembukaannya maupun batang tubuhnya, telah memberikan landasan berpijak bagi mekanisme Pemerintahan untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembauran secara konkrit.

Bagian yang ada kaitannya dengan masalah kesatuan bangsa ini antara lain pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian pasal 26 menyebutkan tentang warganegara serta pasal 27 ayat (1) menyebutkan tentang persamaan kedudukan dalam hukum, yang berbunyi "segala warganegara ber-samaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai satu bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia (pasal 36) dan mempunyai satu bendera negara, yaitu Sang Saka Merah Putih (pasal 35).

2. Sebagaimana

2. Sebagaimana diketahui, usaha perbauran bangsa di segala bidang kehidupan perlu ditingkatkan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ungkapan ini ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya dalam Pola Umum Pelita III yang menyangkut pembangunan kebudayaan. Klausula ini memberi pengertian, bahwa perbauran merupakan sarana untuk menyelesaikan masalah persatuan dan kesatuan bangsa, suatu proses historis, sosiologis dan sosial psikologis menuju terpadunya bangsa Indonesia.
3. Persatuan dan kesatuan bangsa, yang ingin diwujudkan melalui perbauran, adalah yang dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila, sesuai dengan Krida ke-5 Sapta Krida Kabinet Pembangunan III. Ini berarti, bahwa masyarakat Indonesia yang diinginkan, adalah suatu masyarakat yang bersuasana hidup damai lahir dan batin, rukun dan penuh kegotong-royongan sesuai dengan moral Pancasila yang ditunjukkan dalam TAP MPR NO. II/MPR/1978 tentang pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dengan lain perkataan bahwa sasaran yang hendak dicapai dengan perbauran adalah persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi Nasional sesuai dengan moral Pancasila.
4. Demikian pula dalam Mawasan Nusantara Garis-garis Besar Haluan Negara terungkap tegas mengenai keadaan bangsa yang dicita-citakan, yaitu antara lain disebutkan bahwa "Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya", selanjutnya disebutkan "bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-bangsa dan se-Tanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa".

5. Sebenarnya ....

5. Sebenarnya masih terdapat beberapa bagian dari TAP-TAP DPR yang menyinggung persatuan dan kesatuan bangsa, akan tetapi dengan apa yang telah dicukilkan tadi dianggap cukup memberikan gambaran, bahwa pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembauran mempunyai landasan konstitusional yang kuat di samping landasan idiil (Pancasila) guna dijabarkan lebih lanjut dalam pengaturan dalam peraturan maupun kebijaksanaan lainnya. Selain itu TAP MPRS No. III/MPRS/1966 waktu itu juga telah menggariskan pentingnya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui proses integrasi dan asimilasi dengan menghilangkan semua hambatan-hambatan yang merintanginya.
6. Dengan demikian dapatlah kiranya disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah sasaran yang harus dicapai dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional, guna mewujudkan tujuan nasional;
  - b. Sasaran itu dicapai dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila yang makin mendalam;
  - c. Kebijakan strategis untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan lebih meningkatkan usaha-usaha pembauran di segala bidang kehidupan.

#### IV. PENGERTIAN PEMBAURAN

1. Pembauran adalah suatu perkataan dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata asimilasi (assimilation). Kata "pembauran" berasal dari kata "bur" yang berarti berpadunya dua unsur atau lebih sedemikian rupa, sehingga lebur dengan menunggal dalam satu kesatuan yang bulat.  
/pabila pengertian pembauran tadi dihubungkan dengan sesuatu bangsa, maka pembauran atau asimilasi berarti bersatu padunya unsur-unsur bangsa yang secara etnis kultural berbeda dalam wujud sosiologis maupun mental psikologis sehingga terbentuk satu kesatuan bangsa yang bulat padu.

2. Kemudian ....

2. Kemudian apabila kita hubungkan pengertian pembauran tersebut dengan Bangsa Indonesia yang dalam kenyataannya terdiri dari unsur yang berbhineka, maka yang dimaksud dengan pembauran bangsa Indonesia adalah suatu proses penyatu-paduan unsur-unsur bangsa yang berbeda-beda asal keturunan, suku, bahasa, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjadi satu kesatuan yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu satu kesatuan bangsa yang secara psikologis harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.
3. Proses penyatu-paduan untuk menjadi satu kesatuan bangsa itu dilakukan melalui usaha mewujudkan kesamaan pengertian tentang nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan bagi pembinaan kesatuan Bangsa, dimana ke-Bhinneka-an unsur-unsur budaya bangsa Indonesia itu tidak boleh menjadi penghambat dan penghalang, bahkan harus dapat menjadi motif pendorong untuk bersatu, dan menjadi faktor yang memperkaya budaya Nasional yang memupuk persatuan dan kesatuan dimaksud.
4. Dalam proses pembauran, setiap individu bergerak melalui tahap-tahap sikap mental dalam hidup bergaul dengan masyarakat, yaitu melalui tahap-tahap :
  - a. Adaptasi, suatu tahap penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya;
  - b. Integrasi, suatu tahap penyatu-paduan diri dengan sistim nilai-nilai kehidupan masyarakatnya;
  - c. Identifikasi, suatu tahap dimana seseorang telah berhasil menyatu-padukan diri dalam sistim nilai kehidupan dan dapat menyatakan menjadi bagian mutlak dari masyarakatnya. Dalam tahap identifikasi ini dapat dikatakan, bahwa seseorang yang telah menginjak tahap tersebut telah melebur dan manunggal dalam sistim nilai kehidupan masyarakat, atau dengan perkataan lain orang itu telah masuk dan diterima sebagai anggota masyarakat Indonesia dengan segala suka dan dukanya dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam.

5. Jadi .....

5. Jadi seseorang yang dianggap telah membaur dalam kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia, apabila :
  - a. Dia telah merasa bersatu, merasa senasib sepenanggungan, merasa bersama dalam suka dan duka dengan warga masyarakat Indonesia, dan
  - b. Dia telah diterima sebagai bagian dari anggota masyarakat Indonesia, karena telah benar-benar menyatu dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam secara Nasional.
6. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa usaha pembauran bangsa pada hakikatnya adalah penyatu paduan nilai kehidupan individu atau golongan masyarakat, baik nilai religi, nilai moral maupun nilai kultur, dalam sistim nilai kehidupan masyarakat yang luhur dan mempersatukan, yaitu nilai kehidupan Pancasila yang ditunjukkan dalam P4.
7. Seseorang atau golongan etnis masyarakat yang berasal dari lingkungan kehidupan di luar wilayah nusantara, yang secara politik telah menjadi warganegara RI tidak secara otomatis memutuskan ikatan mereka dengan nilai kehidupan lama yang telah dianut sebelumnya.

Oleh karena itulah pembauran bangsa mempunyai misi untuk meningkatkan penghayatan nilai kehidupan ke Indonesiaan bagi mereka, sehingga kadar sebagai orang Indonesia lebih menebal yang sangat diperlukan bagi peningkatan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

#### V. PEMBAURAN PENDIDIKAN

1. Kiranya dimaklumi, bahwa fungsi utama dari pendidikan Nasional adalah transformasi budaya bangsa kepada generasi-generasi mendatang secara berkelanjutan, sehingga yang kita kerjakan dan dialami oleh generasi muda sekarang akan ikut menentukan hari kemudian bangsa.

Sebagai .....



Sebagai tindak lanjut dari program pembauran pendidikan telah ditentukan suatu matrix sistem pendidikan nasional, yang antara lain bermaksud mendorong kelancaran proses pembauran dengan cara:

- a. Mengadakan pemisahan yang tegas antara pendidikan asing dan pendidikan nasional dengan maksud agar anak didik Indonesia terutama dalam tahun-tahun pembentukannya jiwanya, sepenuhnya memperoleh pendidikan nasional.
  - b. Adanya ketentuan, bahwa pendidikan asing hanya diijinkan bagi anak didik asing penduduk sementara, sedangkan anak didik Indonesia termasuk anak-anak asing penduduk/tetap Indonesia harus memperoleh pendidikan nasional.
  - c. Adanya ketentuan yang mengharuskan kita bersikap selektif terhadap perijinan sekolah di luar negeri sesuai dengan pikiran dasar di atas. Perlakuan selektif dimaksud tidak berdasarkan golongan etnis akan tetapi berdasarkan keadaan anak didik itu secara obyektif dan berdasarkan jenis pendidikan yang hendak ditempuh.
2. Berlandaskan pokok pikiran di atas timbullah keharusan-keharusan lainnya, yaitu antara lain :
- a. Menganggap semua lembaga pendidikan nasional, di Indonesia sebagai satu sistem pendidikan, yang lain harus mengikuti pola yang sama, juga harus terbuka bagi semua anak didik Indonesia dari golongan etnis apapun.
  - b. Bahwa senestinya antara sekolah negeri dan swasta tidak ada perbedaan lagi yang prinsipil, karena kedua macam sekolah itu sama-sama menjalankan fungsi pendidikan nasional.
  - c. Pikiran dasar itu sesungguhnya mendorong terjadinya pembauran secara alamiah melalui kontak sosial dan "interchange of values" sejak anak didik Indonesia berada di bangku sekolah.
  - d. Sifat-sifat kekhususan yang masih diperbolehkan melekat pada lembaga-lembaga pendidikan swasta tidak boleh menjurus kepada eksklusivisme dan chauvinisme golongan, tetapi harus ikut aktif dalam menanamkan toleransi dan tanggung jawab sosial pada semua anak didiknya.

e. Dalam .....

- e. Dalam mendirikan sekolah-sekolah baru perlu dipikirkan pemilihan lokasi yang tepat yang memungkinkan penampungan murid dari semua golongan ethnias bertempat tinggal di lingkungan sekolah itu.
3. Dalam kaitannya dengan pembauran pendidikan itu, juga berdasarkan pengamatan sehari-hari menunjukkan bahwa dalam pembauran pendidikan paling sedikit terdapat 4 komponen masyarakat yang menjadi penentu terhadap berhasil atau tidaknya proses pembauran, yaitu : Guru, anak didik, keluarga (orang tua) dan masyarakat. Keempat komponen itu saling menentukan cepat atau lambat proses interaksi secara wajar dan alamiah, menuju pembauran yang idial. Ini berarti, bahwa berhasilnya anak didik dalam pembauran fisik dan mental (budaya) sangat tergantung dari interaksi antara guru, orang tua dan masyarakat yang saling menunjang. Guru mempunyai peranan dalam sekolah dan orang tua serta masyarakat menentukan corak dan akan mewarnai kehidupan masyarakat yang menjadi lingkungan hidup anak didik tersebut.
  4. Tingkah laku guru, orang tua dan masyarakat itu akhirnya menentukan sikap anak didik. Jika sikap guru, orang tua dan masyarakat menunjukkan citra pembauran yang idial, maka anak didikpun akan mengikutinya. Sebaliknya jika sikap guru, orang tua dan masyarakat cenderung menunjukkan sifat eksklusivistis, maka anak didikpun cenderung bersikap demikian, oleh karena itu tingkah laku komponen-komponen masyarakat tersebut menjadi sasaran utama penggarapan, karena tidak mustahil perilaku komponen-komponen itu dapat mempunyai motif-motif tertentu yang kemungkinan mempunyai implikasi di bidang politik.
  5. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa berhasilnya pelaksanaan pembauran pendidikan bukanlah menjadi tugas sekolah saja akan tetapi merupakan tugas bersama antara sekolah, keluarga dan masyarakat dengan bimbingan dan pengarahan dari Pemerintah.

Menumbuhkan .....

Menumbuhkan sikap cinta kepada Tanah Air, Bangsa dan Negara dari anak-anak didik yang berasal dari suku/keturunan yang berbeda, sungguh merupakan tugas kita bersama.

6. Sekalipun berhasilnya pembauran pendidikan tidak saja tergantung dari sekolah formal, namun peranan guru tetap menentukan karena antara lain :

- a. Guru tetap menjadi figur yang di "gugu" dan di "tiru" (menjadi panutan).
- b. Guru menentukan berhasil atau tidaknya seseorang anak didik menyelesaikan pendidikan formalnya.
- c. Guru dapat mempengaruhi dan memberi warna terhadap pola sikap dan tingkah laku anak didik.

Oleh karena itulah dalam proses mengajar di sekolah, seorang guru harus menunjukkan sikap yang mendidik pembauran dan tidak menimbulkan benih-benih perpecahan maupun pengkotakan etnis rasial terhadap anak didik di kelas maupun di sekolah baik yang bersifat administratif maupun yang realistik.

7. Dengan demikian jelaslah betapa besarnya peranan pembauran pendidikan khususnya peranan guru/pendidik dalam meningkatkan pembinaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan anak didik pada sekolah formal, sekalipun hal itu masih dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan yang lain, baik keluarga maupun masyarakat. Karenanya pembauran pendidikan harus pula diikuti bersama-sama dengan pembauran di bidang bidang lain.

8. Selain permasalahan tentang peranan pendidikan di sekolah formal di atas, juga komposisi anak didik di kelas masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Konsep.....

Konsep komposisi anak didik yang dipaksakan ternyata tidak seluruhnya berhasil, karena antara lain menyangkut kebebasan orang tua memilih sekolah yang dianggap baik bagi anaknya dan kaitan erat antara lokasi sekolah dengan domisili anak-didik tersebut.

9. Sarana bagi berhasilnya pembauran pendidikan yang paling penting adalah pelaksanaan kurikulum pendidikan nasional di semua tingkat sekolah dan tersedianya guru/pendidik yang mempunyai sikap mental pembauran sebagai salah satu wujud sikap mental Pancasila yang dicerminkan dalam pola sikap dan tingkah laku sehari-hari di sekolah maupun masyarakat.

## VI. BAKOM PKB DAN TEAM ASSIMILASI

### A. BAKOM PKE

1. Kiranya telah dimaklumi, bahwa terjalinnya komunikasi antar kelompok masyarakat dan antar pribadi merupakan salah satu sarana yang efektif bagi pembauran dan karenanya perlu ditingkatkan, agar terdapat kesamaan nilai-nilai kehidupan yang sangat bermanfaat bagi usaha mengurangi hambatan hambatan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan integritas Nasional.
2. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 1977 telah memberikan restu berdirinya Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) Pusat yang telah didirikan dua bulan sebelumnya (tanggal 28 Oktober 1977) oleh beberapa orang tokoh pembauran. Sedangkan BAKOM PKB di Daerah-daerah telah dibentuk berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri dalam kawat No. 600/KWT/SOSPOL/D2/VIII/1977 tanggal 25 Agustus 1977.
3. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam peraturan dasarnya, BAKOM PKE adalah suatu badan kemasyarakatan (institusi sosial) yang membawakan aspirasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Mawasan Nusantara/GBHN.

Selanjutnya .....

Selanjutnya di dalam Peraturan Dasarnya dirumuskan beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Tujuan :

Memperlancar dan mempercepat peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa melalui proses pembauran antar semua unsur warganegara Indonesia di segala bidang penghidupan dan kehidupan.

b. Tugas Pokok :

Membantu Pemerintah (di Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan di Daerah melalui Kepala Daerahnya masing-masing) untuk mensukseskan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional.

c. Fungsi :

Antara lain berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah secara timbal balik.

d. Usaha :

Antara lain mengajukan pemikiran dan saran-saran yang berkenaan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan pembinaan dan penghayatan kesatuan Bangsa kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

4. Dari rumusan-rumusan yang tercantum di dalam Peraturan Dasarnya, dapat disimpulkan adanya 2 kegiatan pokok BAKOM PKB, yaitu :

- a. Kegiatan ke dalam memberikan saran-saran kepada Pemerintah;
- b. Kegiatan ke luar mengadakan komunikasi/konsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam usaha menunjang pelaksanaan program Pemerintah.

B. TEAM .....

## B. TEAM ASSIMILASI

1. Team Assimilasi yang dimaksudkan disini adalah Team Assimilasi Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 tahun 1975 - No. 060a/P/1975 tentang penunjukkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Penanggung jawab Pengendalian Pelaksanaan Assimilasi di Bidang Pendidikan di Daerah. Nama lengkap Team yang membantu Gubernur Kdh. itu adalah "Team Pembantu Pelaksanaan Assimilasi di bidang Pendidikan di Daerah" yang biasanya disingkat Team Assimilasi Daerah, untuk membedakannya dengan Team Assimilasi Pusat.
2. Dalam hubungan ini kiranya perlu diungkapkan sedikit mengenai Team Assimilasi Daerah ini antara lain mengingat kaitannya yang cukup erat dengan bidang tugas Departemen Dalam Negeri, dimana dalam susunan kepengurusannya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ditunjuk sebagai penanggung jawab dan unsur Direktorat Sospol/Pemda ditetapkan duduk pula dalam kepengurusan tersebut.
3. Untuk lebih meningkatkan kegiatannya sehari-hari kiranya perlu dicari pemecahannya yang tepat, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal, misalnya dengan koordinasi kegiatan antar instansi berdasarkan penyatuan pemikiran tentang pembauran pendidikan formal maupun non formal/masyarakat.

## C. KOORDINASI KEGIATAN

1. Suatu usaha yang tepat untuk menggiatkan Team Assimilasi Daerah dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain dengan mengadakan koordinasi kegiatan dengan BAKOM PKB setempat dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik menyangkut pembauran pendidikan formal maupun masyarakat.

2. Dengan ....

2. Dengan koordinasi ini diharapkan kedua pihak dapat saling isi mengisi, mengingat status BAKOM PKB yang dapat dikatakan semi Pemerintah dan anggotanya terdiri dari unsur masyarakat dan unsur Pemerintah, sedangkan Team Assimilasi Daerah adalah resmi Pemerintah yang anggota-anggotanya sepenuhnya dari unsur Pemerintah, sehingga dengan demikian Team Assimilasi diharapkan dapat langsung berkomunikasi dengan masyarakat.

## VII. P E N U T U P

1. Masalah persatuan dan kesatuan bangsa mempunyai latar belakang sejarah yang jauh ke belakang yang apabila ingin mendalaminya guna mencari pemecahan dan pembinaannya, maka latar belakang sejarahnya harus diketahui terlebih dahulu.
2. Pembauran pendidikan sebagai sarana pokok mencapai persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pembauran kultural yang menyangkut terwujudnya kesatuan tata nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana untuk itu perlu diciptakan suasana masyarakat yang mendukung berlangsungnya pelaksanaan pembauran pendidikan.
3. Penciptaan suasana yang mendukung tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui tugas dan fungsi masing-masing aparatur Pemerintah antara lain pendidik yang bermental pembauran sebagai salah satu wujud pengamalan Pancasila. Selain itu peranan kurikulum nasional sangat besar bagi berhasilnya pembauran pendidikan.  
Penciptaan suasana mendukung juga berlangsungnya komunikasi/kontak sosial yang semakin akrab. Dengan komunikasi tersebut jelas akan terwujud satu kesatuan tatanilai yang diperlukan untuk pelaksanaan pembauran termasuk pula pembauran pendidikan.

4. Wadah .....

4. Madah yang disediakan untuk mendorong terselenggaranya komunikasi dalam masyarakat tersebut adalah Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) yang juga berperan sebagai katalisator dalam komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah. Dalam hal pelaksanaan pembeuran pendidikan kiranya dapat dimanfaatkan adanya BAKOM PKB tersebut, karena kedudukannya sebagai partner Pemerintah daerah.

Demikian juga untuk lebih dapat mengintensifkan kegiatan Team Assimilasi Pendidikan di Daerah, kiranya Team ini dapat mengadakan koordinasi yang baik dengan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa setempat.

Demikian makalah ini disajikan, semoga bermanfaat hendaknya.

Direktur Jenderal Sosial Politik,

Prapto Prajitno



**PENDIDIKAN SEBAGAI SARANA  
PEMBANGUNAN BANGSA**

oleh :  
**SUNARSO**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK ASIMILASI  
DIBIDANG PENDIDIKAN DAN PENGATURAN  
PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

**1981**

PENDIDIKAN  
SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN BANGSA

PENDAHULUAN

1. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk diminta memberikan ceramah di Lokakarya ini, dan diperbolehkan "udu rembug" atau sumbangan pikiran mengenai peranan pendidikan nasional dalam pembangunan bangsa, khususnya soal asimilasi warganegara keturunan asing ke dalam bangsa Indonesia.

2. Saya menyadari sepenuhnya kesukaran-kesukaran yang dihadapi para pendidik, yang tidak saja dituntut oleh masyarakat untuk memberi pelajaran yang berguna bagi anak didik, mengasah otaknya agar mampu menempuh hidupnya dengan cerdas, tetapi juga diharapkan agar dapat mengasuhnya demikian rupa supaya besoknya dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat maupun bagi dirinya.

Dari tuntutan dan harapan masyarakat itu dapat diambil pelajaran bahwa memang pendidikan bukan hanya "transfer of knowledge" tetapi lebih-lebih adalah "transfer of values".

3. Dengan makin pesatnya pembangunan makin besar juga harapan dan tuntutan rakyat akan pendidikan yang bermutu, sebab dengan pembangunan dirangsang pula hasrat untuk mencapai kemajuan bagi diri pribadi dan keluarganya.

Dan pendidikan memberikan persyaratan serta peralatan untuk maju itu. Perkenankanlah saya sekarang menambah beban Saudara, yang sudah cukup berat itu, untuk ikut menghinbau dengan menyampaikan pikiran-pikiran saya mengenai peran yang dapat dilakukan pendidikan dalam nation and character building.

PEMBANGUNAN.....

## PEMBANGUNAN BANGSA SEBAGAI PROSES DEKOLONISASI

1. Bangsa Indonesia boleh berbahagia, bahwa kita mampu bangkit kembali dari lembah penjajahan dengan terlebih dahulu menyatukan tekad sekian banyak suku-suku bangsa untuk menjadi satu bangsa.

Andaikata Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu tidak terjadi, mungkin saja proses pembentukan bangsa akan berjalan sangat lamban, dan andaikata kemerdekaan pun dapat tercapai bagi seluruh nusantara proses nation-building akan tersendat-sendat seperti yang terjadi di banyak negara Asia dan Afrika yang memperoleh kemerdekaannya sehabis Perang Dunia II.

Burma umpamanya yang sampai sekarang belum saja dapat menyatukan 5 - suku bangsa utama yang menjadi penduduknya, sehingga kesatuan politik Burma terpaksa dipelihara melalui proses yang berkepanjangan lagi berdarah. Keadaan Uganda kita ketahui dari surat-surat kabar, bahwa keadaan mereka jauh lebih parah karena kekuasaan pemerintahan rupanya hanya bisa ditegakkan berdasarkan kekuatan suku bangsa yang sedang berkuasa, bukan atas dasar "popular support".

Contoh-contoh demikian dapat kita temukan di Eropa, seperti Belgia yang masih saja diganggu oleh sentimen-sentimen kebudayaan kesukuan, dalam hal ini antara yang berbahasa Flamingan dan yang berbahasa Perancis.

2. Namun kita pernah juga mengalami gelombang separatisme, yang hampir saja memecah-mecah lagi kesatuan yang telah kita pupuk bersama. Dan kalau kita teliti, sebab musababnya tidak bersumber dari keinginan untuk melepaskan diri dari kesatuan Indonesia, tetapi lebih banyak dari permasalahan-permasalahan sosial ekonomi dan lain-lain yang tidak memperoleh penyelesaian tuntas.

3. Pengalaman ...

3. Pengalaman-pengalaman yang pahit itu menunjukkan bahwa proses dekolonisasi belum selesai dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Penyesuaian-penyesuaian dan perombakan-perombakan berbagai sistem dan struktur masyarakat terjajah agar menjadi sesuai benar dengan cita-cita bangsa belum semuanya terwujud. Hukum yang berlaku masih banyak tersisa dari warisan Belanda, yang sebetulnya tidak sesuai dengan kondisi yang telah berkembang.
- Baru saja DPR mengesahkan Hukum Acara Pidana yang baru sebagai pengganti yang lama. Apapun penilaian orang terhadap kualitas undang-undang baru itu, kita harus akui bahwa itu adalah hasil bangsa sendiri dalam rangka proses dekolonisasi itu.
- UU-Pokok Agraria dan UU Land-reform merupakan upaya besar untuk meniadakan penguasaan yang tidak adil atas tanah sebagai sumber produksi yang pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
- Dan kita sekarang sedang sibuk merencanakan tata-guna tanah baik bagi kepentingan ekologi maupun bagi kepentingan pembangunan.
- Banyak yang sudah kita rombak, namun banyak pula yang masih harus kita kerjakan antara lain perombakan UU Catatan Sipil yang membagi-bagi penduduk Indonesia dalam golongan-golongan Eropa, Orang-orang Timur Asing dan Pribumi.
- Tata masyarakat demikian barangkali cocok untuk masyarakat yang terjajah sesuai dengan kepentingan penjajah, tetapi sudah tidak pada tempatnya di dalam masyarakat yang telah bebas.
- Baik Pancasila dan UUD-45 memandang semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, apalagi diantara sesama warganegara.
- Sekalipun maksud Belanda dahulu dengan aturan yang berbau diskriminatif itu adalah untuk memberikan keadilan yang merata sesuai dengan tradisi hukum masing-masing golongan, akhirnya UU Catatan Sipil itu memperkuat gejala untuk memandang dan memperlakukan penduduk menurut garis-garis rasial. Hal demikian barang tentu tidak mendukung proses kearah asimilasi bangsa.

4. Oleh .....

4. Oleh karena itu Ketua Presidium pada tahun 1966 meng-instruksikan kepada Departemen Kehakiman untuk selekasnya merombak UU-Catatan Sipil, agar terwujud kesamaan kedudukan antar semua warganegara dan perbedaan yang jelas antara arganegara sendiri dengan warganegara asing, serta hapusnya sebutan "pribumi" dan "non-pribumi".

Sampai sekarang kita belum dapat merobah UU-Catatan Sipil itu, berhubung terbentur pada kemajemukan Hukum Perdata yang berlaku.

(Bagi golongan Eropa dan Orang-orang Timur Asing berlaku *Burgelijk Wetboek*, bagi Pribumi berlaku Hukum Adat masing-masing). Selama masih belum saja terwujud kesatuan hukum perdata, selama itu pula dalam prakteknya akan masih ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan berlanjutnya golongan-golongan menurut klasifikasi kolonial.

Maka makin menjadi penting sekarang usaha-usaha mewujudkan asimilasi Bangsa melalui usaha-usaha dalam bidang pendidikan, perekonomian, kebudayaan dan lain-lain agar nanti secara materiil asimilasi itu selekasnya terwujud, sehingga hukum perdata baru yang pasti akan ada lalu merupakan legalisasi keadaan yang sudah ada.

5. Baik kebijaksanaan nasional dan tuntutan aspirasi nasional maupun keadaan mendesak terwujudnya asimilasi bangsa itu, demi ketahanan nasional Indonesia.

Kita tidak bisa menunggu rampungnya proses dekolonisasi dalam hukum. Bahwa kedudukan keturunan asing, khususnya peranakan Cina, masih merupakan persoalan yang peka dapat kita saksikan dengan kerusuhan-kerusuhan yang cepat meluas dari Solo ke lain-lain kota dan daerah. Memang benar bahwa kerusuhan itu tidak murni rasial, akan tetapi "anti-Cina" dipakai sebagai "rallying issue" bagi suatu perjuangan politik tertentu.

Mamun bahwa issue itu mudah termakan oleh massa rakyat, menunjukkan bahwa psikologi massa masih peka sekali terhadap segala sesuatu mengenai peranakan Cina, seakan-akan menjadikan penduduk Cina sebagai simbol dari segala yang tidak baik. Dan oleh karenanya mudah sekali dijadikan "kambing hitam".

6. Keadaan .....

6. Keadaan demikian sesungguhnya merupakan warisan kolonial, karena memang Belanda sengaja memakai potensi kaum perantau Cina untuk pengembangan perekonomian Hindia Belanda dan sekaligus sebagai "perantara" dalam hubungannya dengan penduduk asli.

Maka tidak mengherankan, bahwa rakyat menganggap kaum Cina perantauan sebagai alat kolonialisme. Bagi Belanda sendiri kaum Cina Perantauan juga merupakan masalah, apalagi setelah Kaisar Manchu yang terakhir dalam tahun 1909 mengakui Cina Perantauan dan anak cucunya sebagai warganegara Cina.

Belanda segera menjawab dengan keluarnya apa yang dikenal sebagai "De Wet van Tien" tahun 1910, yang menjadikan semua orang Cina penduduk Hindia Belanda sebagai "kaula negeri Belanda" (Nederlandsch Onderdaan niet Nederlanders), dan dengan demikian melepaskan penduduk Cina disini dari kekuasaan negeri asalnya. Selanjutnya melalui pendidikan dan lain-lain tindakan Belanda berusaha untuk membuat si Cina menjadi Belanda.

Sedikit banyak usaha tersebut berhasil, seperti dapat dilihat dari tulisan Dr. Leo Suryadinata dalam bukunya "Political Thinking of the Indonesian Chinese, 1900 - 1977".

7. Menurut pengamatannya di dalam buku tersebut, pola-pola pikiran yang terdapat pada masyarakat peranakan Cina adalah sebagai berikut :

#### Periode Penjajahan.

Pola pemikiran pada penduduk keturunan Cina pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal : keinginan untuk dipersamakan kedudukannya dengan golongan Belanda (penjajah yang berkuasa), keinginan untuk tetap mempertahankan identitas sebagai bangsa Cina dan keinginan untuk memperoleh fasilitas seperti orang pribumi.

Maka sesuai dengan aspirasi-aspirasi di atas dapat dibedakan adanya 3 aliran pemikiran politik :

a) Golongan .....

- a) Golongan yang berhasrat mempertahankan kewarganegaraan Cina, akan tetapi ingin tetap hidup mencari nafkahnya di Indonesia. Aliran ini disebut aliran SIN PO, karena para pemimpinnya adalah orang-orang yang memimpin Harian "SIN PO".
- b) Golongan yang menginginkan kewarganegaraan Belanda (Nederlands Onderdaanschap) dan dipersamakan kedudukannya dengan orang-orang Belanda. Mereka ini tergabung dalam perkumpulan "Chung Hua Hui". Aliran ini terutama terdiri dari orang-orang berpendidikan Belanda dan menganggap pemerintah penjajahan Belanda sebagai penguasa yang tepat bagi rakyat Indonesia, dan oleh karenanya menginginkan terus berlangsungnya penjajahan Belanda.
- c) Golongan yang menginginkan kewarganegaraan Hindia Belanda dan persamaan hak dengan orang-orang pribumi, bersimpati pada gerakan nasionalisme Indonesia serta mendukung gagasan adanya pemerintahan sendiri untuk bangsa Indonesia. Mereka membentuk partai politik dalam tahun 1932 dengan nama Partai Tionghoa Indonesia. Dari golongan ini timbul fraksi kecil yang menginginkan asimilasi total bagi orang-orang keturunan Cina ke dalam masyarakat pribumi yang diprakarsai oleh Kwee Hing Tjiat (1934).

#### Periode Pendudukan Jepang.

Dengan jatuhnya pemerintah jajahan Belanda hapuslah kekuasaan yang tadinya dianggap akan dapat terus berlangsung, dan faktor-faktor baru seperti perkembangan nasionalisme di Asia dan propaganda Jepang menjunjin' balikkan orientasi golongan "Chung Hua Hui" yang pro Belanda itu.

Ada sementara pemuka mereka yang menganjurkan agar orang-orang keturunan Cina kembali masuk kewarganegaraan Cina, dan adapula yang menganjurkan agar kepada orang-orang ini diberikan keleluasaan untuk memilih sendiri kewarganegaraan apa yang disukai, Cina atau Indonesia.

Barang tentu ....

Barang tentu anjuran ini menarik sekali bagi mereka yang termasuk aliran SIN PO.

Aliran yang ketiga, di bawah prakarsa Liem Koen Hian pada tahun 1945 menuntut kepada Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan agar semua orang Cina yang lahir di Indonesia dipermaklumkan sebagai warganegara Indonesia melalui UU Dasar R.I.

#### Setelah Indonesia Merdeka.

Dari uraian di atas nyata sekali bahwa kewarganegaraan merupakan issue yang pokok di samping kedudukan di dalam masyarakat pribumi. Sebagaimana sejarah membuktikan Pemerintah Indonesia memilih memberikan kebebasan kepada orang-orang keturunan Cina untuk memilih sendiri kewarganegaraan yang disukai, baik melalui opsi ataupun kemudian melalui ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Dwi-kewarganegaraan dengan RRC. Dan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk menjadi WNI melalui naturalisasi.

Namun pemikiran politik dikalangan penduduk keturunan Cina, menurut buku Dr. Leo Suryadinata itu tetap berbeda-beda :

- a) Ada diantaranya yang cenderung untuk mempertahankan bahwa orang-orang Cina di Indonesia adalah tamu dan berkedudukan sebagai Hoa Kiao.  
Golongan ini meskipun bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia, tetapi menuntut hak sebagai golongan minoritas.
- b) Sebagian lagi terutama yang masuk Partai Demokrasi Tionghoa Indonesia, menghendaki agar orang-orang Cina memilih kewarganegaraan Indonesia, namun ingin tetap mempertahankan identitas kebudayaan Cina.

BAPERKI di bawah pimpinan Siauw Giok Tjan berhaluan kiri dan berpendirian bahwa orang-orang Cina merupakan suku dalam tubuh bangsa Indonesia. Tidak setuju pula dengan asimilasi, tetapi integrasi melalui suatu revolusi sosial.

c) Tokoh .....



- c) Tokoh lain lagi dari BAPERKI juga tidak menyetujui asimilasi yang dipaksakan akan tetapi berbeda dengan Siauw tidak menyetujui penyelesaian konflik-konflik rasial dan ethnias di Indonesia melalui suatu proses revolusi sosial. Tokoh ini mengusulkan penyelesaian menurut "jalan Kristus", yaitu dengan jalan "pensucian hati" dan menciptakan hukum dan peraturan yang anti perbedaan warna kulit.
- d) Di damping itu pecahnya bangsa Cina menjadi penganut aliran Komunis dan Nasionalis, terpecah pula loyalitas penduduk Cina di Indonesia yang menghendaki kewarganegaraan Cina, menjadi yang berwarganegar PRC dan yang berwarganegara Taiwan (Stateless di Indonesia karena Taiwan tidak diakui sebagai negara Cina).
- e) Aliran asimilasi yang lahir dengan "Piagam Asimilasi" dalam tahun 1961, yang berpendirian bahwa masyarakat Cina perlu meleburkan diri 100% menjadi pribumi sama sekali.

Gerakan asimilasi didukung oleh Pemerintah, karena memang sesuai dengan cita-cita Sumpah Pemuda 1928 dan cita-cita seperti yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 45. LPKB yang didirikan dalam tahun 60-an untuk menjadi wadah gerakan ini sekarang diteruskan oleh BAKOR PKB.

Hamun masih ada lagi suatu kelompok kecil di negeri Belanda yang menghendaki suatu "identitas nasional" yang terpisah bagi keturunan Cina Indonesia. Kelompok ini mengeluarkan majalah "Na Han" sejak tahun 1976 dan menganjurkan terwujudnya apa yang mereka namakan "Nasionalisme Yin Hua" bagi semua keturunan Cina. Konsep ini didasarkan atas pandangannya bahwa di Indonesia hidup berdampingan banyak "bangsa-bangsa" dan bukan suku-suku yang menjadi satu, berbeda dengan BAPERKI yang menghendaki status suku bangsa bagi keturunan Cina.

Kelompok .....

Kelompok ini tidak mengakui negara Indonesia, bahkan selalu menyebutnya dengan Hindia atau Nusantara karena menganggap nama Indonesia sebagai kreasi dari kaum borjuis yang reaksioner. Bahkan dalam pandangannya Yin hua ini meliputi semua orang keturunan Cina sebagai satu kesatuan identitas, dan kelompok ini menganggap penting sekali hubungannya dengan PRC, dalam kedudukannya sebagai suatu identitas nasional tersendiri. (negara Yin hua di dalam negara Indonesia ?).

8. Sebagaimana dapat dilihat dari uraian di atas sebagian besar dewasa ini menghendaki asimilasi total, menghendaki hak dan kewajibannya sama dengan sesama warganegara lainnya. Memang demikian semestinya, karena sikap demikian sesuai benar dengan konsep kebangsaan Indonesia menurut Pancasila maupun UUD 45.

Mereka juga menghendaki agar mereka jangan sampai tidak dipaksa untuk selalu memilih perdagangan/business sebagai profesinya, meminta agar profesi-profesi lain juga terbuka sama lebarnya bagi mereka.

Dilain pihak kelompok yang menghendaki "integrasi" sebagaimana yang dipikirkan oleh BAPERKI menginginkan tetap terpeliharanya existensi kelompok mereka sebagai kelompok etnis, terutama dalam hubungannya dengan kebudayaannya. Bahkan minta agar ada yang mewakili kepentingan-kenentingan mereka di lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat. Di sementara kalangan mereka pola pikiran ini masih hidup.

Di samping itu Taiwan dan PRC berusaha menarik loyalitas Cina Perantauan, bahkan Taiwan menggarap semua orang Cina dalam usaha Kuo Min-Tang untuk kembali menguasai seluruh wilayah Cina.

(Cina Perantauan = Warganegara Cina yang bermukim di luar negeri). Banyak cara yang mereka pakai antara lain melalui kebudayaan, agar dengan demikian masih dapat memelihara identitas ke-cina-an para Hoa kiao maupun yang sudah menjadi warganegara asing.

Karena pada ....

Karena pada dasarnya nasionalisme Cina adalah nasionalisme kebudayaan, pendekatan kebudayaan adalah paling berbahaya bagi usaha-usaha asimilasi yang kita sedang lakukan.

9. Dari pihak RRC masih ada lagi bahaya yang lain, yaitu komunisme, justru karena komunisme yang mereka propagandakan diberi selubung nasionalisme.

Tahu akan adanya perasaan anti Cina yang latent dikalangan penduduk asli negara-negara di Asia Tenggara, Uni Sovyet memanfaatkan itu dengan membesar-besarkan ancaman Hoa Kiao sebagai kolone ke V RRC dan lain-lain sebagainya.

Dalam suasana dunia yang dewasa ini nampak makin konfrontatif, dan masalah-masalah sosial juga makin kompleks sehingga tidak mudah menemukan cara-cara penyelesaiannya, ditambah pula dengan makin besarnya tuntutan dan harapan masyarakat akan keadilan sosial dan kesejahteraan, terdapat kecenderungan orang makin mudah mengambil jalan radikal. Radikalisme mudah mengobarkan gerakan-gerakan anti Cina, gerakan-gerakan anti Pemerintah atau anti apa saja, dan dengan demikian mudah pula ditunggangi oleh aliran politik apapun demi kepentingan mereka.

Sebagaimana kita dapat lihat dari pengalaman negara-negara Barat, semangat radikal dikalangan muda pernah melahirkan terrorisme anti-establishment, dan sekarang semangat pasifisme dikalangan muda Jerman melahirkan pula radikalisme berbentuk terror anti perang.

10. Pengalaman kita sendiri dengan 2 kali pemberontakan PKI dan pemberontakan DI/TII selama kurang lebih 13 tahun melahirkan Resolusi MPRS no. III tahun 1966, tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa, yang dalam bab Konsiderans menyebut bahwa "Kunci rahasia" persatuan dan kesatuan bangsa terletak di dalam sistem pendidikan Pancasila .

Yang dimaksud .....

Yang dimaksud disini bukanlah hanya pendidikan mengenai Pancasila, tetapi benar-benar perlu dibangunnya suatu sistem pendidikan nasional berdasarkan falsafah Pancasila, karena pada dasarnya Pancasila memang tidak mengenal radikalisme, bahkan menghendaki musyawarah dalam penyelesaian masalah, mengakui hak-hak azasi manusia tetapi dalam keseimbangan dengan kepentingan-kepentingan kolektif masyarakat, mengingat bahwa manusia hanya berarti hidupnya dalam konteks hidup bermasyarakat. Tetapi juga tidak menghendaki kepentingan-kepentingan umum menekan kesempatan orang untuk maju.

Oleh karena itu sistem pendidikan Pancasila harus mampu membangun potensial dan mengembangkannya pada setiap manusia Indonesia, agar ia mampu menjadi orang yang berarti (menjadi asset dan bukan liability) di dalam masyarakatnya dengan cara-cara yang baik, serasi dan seimbang dengan masyarakat sekelilingnya.

11. Sebagai elemen-elemen yang strategis penting, Resolusi no. III itu menempatkan sistem pendidikan Pancasila pada prioritas utama, antara lain menyangkut :

- a) pendidikan agama disemua sekolah sebagai unsur "nation and character building" dengan memberikan kesempatan yang berimbang.
- b) melarang pengembangan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Pancasila.
- c) peningkatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu.

Khusus mengenai masalah Cina dan orang-orang keturunan asing, Resolusi menghendaki hapusnya dwi-kewarganegaraan, mengintegrasikan MNI keturunan asing melalui asimilasi dengan meniadakan semua perbedaan-perbedaan yang dapat menghambat terwujudnya kehidupan yang harmonis dengan yang asli.

Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa kehidupan yang harmonis yang dikehendaki, dan karena harmoni mempersyaratkan nilai-nilai etika asimilasi pada dasarnya adalah persoalan kebudayaan.

Ini adalah .....

Ini adalah tantangan bagi kita semua, terutama bagi Departemen P dan K yang berkewajiban untuk mengelola sistem pendidikan nasional.

12. Hambatan utama yang kita hadapi dalam melancarkan proses asimilasi adalah justru hal-hal yang berasal dari perbedaan latar belakang kebudayaan. Dimata kita orang-orang keturunan Cina, sekalipun sudah menjadi WNI, masih kita pandang sebagai orang asing. Keasingannya itu kita jumpai dalam berbagai bentuk, antara lain sikap hidup mereka yang lebih materialistis, juga lebih pragmatis bahkan kadang-kadang nampak egosentris. Sifat-sifat itu membuat mereka belum dapat dianggap sebagai "orang sendiri", sehingga hal demikian menjadi halangan psikologis bagi asimilasi.

Oleh karena itu, sejak Pemerintah Orde Baru menangani masalah Cina dalam tahun 1966, pendidikan nasional selalu dijadikan ujung tombak dari semua usaha asimilasi.

Dengan pendidikan kita harapkan untuk dapat mencapai sebanyak mungkin anak umur sekolah, agar dapat kita rubah pandangan hidupnya, sikap hidup dan cara berfikirnya, mentalnya juga supaya lebih sesuai dengan pola kebudayaan kita.

Generasi tua, apalagi yang lahir sebelum perang, sudah terlalu sukar untuk berubah mengingat jiwanya sudah terbentuk. Hanya orang-orang dari generasi ini yang pernah duduk bersama dengan orang-orang pribumi dalam satu sekolah, yang bagi kita tidak lagi merupakan orang asing. Maka kiranya dapat dimengerti pentingnya tindakan-tindakan Pemerintah sejak tahun 1975, yang menghendaki agar setiap lembaga pendidikan nasional duduk tercampur anak didik dari berbagai unsur etnis, termasuk keturunan asing.

Dengan melalui kontak langsung dan pengalaman-pengalaman bersama diharapkan akan timbul saling pengertian dan toleransi yang makin besar, dan ikatan-ikatan yang wajar sebagai sesama warganegara.

13. Masyarakat ....

13. Masyarakat juga kurang senang dengan banyaknya anak didik Indonesia yang belajar di luar negeri. apalagi kalau di Indonesia sendiri terdapat fasilitas macam pendidikan yang sama. Maksud utama dari sistem perijinan bagi sekolah di luar negeri, adalah agar sebanyak mungkin anak memperoleh pendidikan nasional.

Lepas dari penilaian kita masing-masing mengenai kualitas pendidikan nasional itu, tetapi kita semua kiranya setuju bahwa pendidikan yang kita sajikan di Indonesia mempunyai warna dan sifat khas Indonesia yang tidak mungkin diperoleh di luar negeri. Warna dan sifat khas Indonesia inilah yang kita harapkan dapat diserap dan dihayati oleh anak didik keturunan asing, sehingga tak merasa asing dan bahkan merasa satu dan senasib dengan lingkungannya.

14. Maka benar sekali kiranya pendapat para anggota MPRS tahun 1966, yang menyatakan bahwa kunci persatuan dan kesatuan bangsa adalah sistem pendidikan Pancasila.

Menjadi kewajiban kita bersama untuk melahirkan sistem pendidikan Pancasila itu. Terhadap pertanyaan "yang bagaimana sistem pendidikan itu", perkenankanlah saya mengutarakan pikiran-pikiran saya yang masih embroinal. Menurut hemat saya, sistem pendidikan apapun harus mempunyai relevansi dengan manusia dan lingkungannya.

Filsafat Cina tradisional melihat manusia dalam hubungan kosmis, yang digambarkan dalam hubungan bumi, manusia dan langit. (Langit sebagai simbol ketuhanan). Namun karena manusia hidup di bumi, alam pikiran Cina yang pragmatis lebih banyak berorientasi pada duniawi, berkeinginan untuk mewujudkan sorga di dunia ini. Dengan demikian sifat mereka lebih materialistis, dan karena itu bukan agama yang dipentingkan tetapi filsafat hidup yang memungkinkan lahirnya kehidupan yang harmonis.

Filsafat Pancasila juga mengandung pandangan kosmis, memandang manusia sebagai bagian yang integral dari seluruh semesta alam. Juga harmoni yang dicarinya.

Namun .....

Namun orientasi tradisional masyarakat Indonesia tidak hanya dalam hubungan bumi - manusia - langit, tetapi sekaligus ke-enam penjurur : vertikal ke langit dan ke bawah, horisontal ke 4 penjurur angin Timur - Selatan, Barat dan Utara. Dengan demikian manusia Indonesia menempatkan dirinya dalam titik tengah di dalam sistem kosmis itu, seperti juga manusia Cina.

Perbedaannya adalah, bahwa segala isi bumi bagi orang Indonesia bukanlah barang mati sekedar untuk melestarikan hidupnya, tetapi betul-betul barang hidup yang mempengaruhi kehidupannya, yang memberikan tempat berlindung dan kekuatan baginya tetapi juga dapat menjadi hal yang mengancam kehidupannya.

Orientasi ke-4 penjurur angin memberikan petunjuk bagaimana dia harus mengatur laku hidupnya di dalam masyarakat agar dengan masyarakatpun dia dapat hidup serasi, seimbang dan selaras. Orientasi ke atas adalah kesadaran akan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang selain merupakan sumber dari segala yang ada di alam semesta, juga kemana akhirnya manusia akan pergi.

Oleh karena itu bagi manusia Indonesia semua orang mempunyai kedudukan yang sama sederajat, tidak hanya dimuka hukum tetapi lebih-lebih di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tak mungkin manusia Indonesia berkap diskriminatif terhadap siapapun.

15. Pandangan kosmis demikian melahirkan wawasan kehidupan yang utuh, baik material maupun spiritual, utuh juga in "body and soul".

Pendidikan harus dapat membangun dan menghubungkan potensi yang ada pada setiap anak, agar dapat mencapai keutuhan hidup itu. Anak didik harus dirangsang rasio-nya agar dapat hidup dengan cerdas, pandai memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi mengatur hidupnya di masyarakat, dan pandai pula menentukan tindakan yang tepat dalam menhadapi permasalahan.

Dalam .....

Dalam rangka ini penting sekali mengobarkan semangat untuk mengetahui, untuk mengerti. Orang Barat menyebut hal ini sebagai "the spirit of enquiry", semangat untuk bertanya dan mencari tahu. Janganlah berbuat seperti seorang guru komunis yang berusaha menanam pandangan materialisme di murid-muridnya.

(Contoh : Guru di taman kanak-kanak).

Atau mengecap segala sesuatu sebagai takhayul, kalau kita belum dapat menjelaskan secara ilmiah.

Kita harus akui bahwa banyak hal yang belum kita mengerti dengan jelas, seperti darimana datangnya kekuatan yang begitu besar di dalam atom yang begitu kecil.

16. Contoh di depan menunjukkan pentingnya membuka alam pikiran anak didik. Dan salah kiranya kalau kita menutup kemungkinan pengembangan spirit of enquiry itu, selain akan membatasi perkembangan anak didik itu juga akan membuat dia menjadi orang yang merasa benar sendiri, picik dan dangkal.

Untuk kelestarian hidupnya semua makhluk menghadapi suatu pola perilaku yang dapat di klasifikasi sebagai :

- a) kompetisi/persaingan
- b) saling mematikan/atau memakan
- c) kerjasama.

Pola itu berlaku sehari-hari, dalam kehidupan tingkat rendah (seperti cel-cel dibadan kita) maupun tingkat kehidupan binatang dan tingkat kehidupan manusia. Anak didik harus sadar akan adanya pola alamiah itu, dan harus tahu mengendalikan dirinya kalau kita hendak mewujudkan masyarakat yang harmonis.

Untuk itu perlu dikembangkan pendidikan yang juga mengolah rasa (emosi), tujuannya adalah mendewasakan emosi itu agar mampu menjadi pengaruh yang baik di samping nalar bagi "decision making process" setiap orang dalam menghadapi sesuatu permasalahan.

Dalam .....



Dalam kebudayaan Timur rasa mempunyai peranan penting dalam tanggapan orang terhadap permasalahan hidup, hawa nafsu memperoleh perhatian yang khusus dalam filsafatnya.

Di dalam filsafat Jawa umpamanya, hawa nafsu dinilai sebagai suatu naluri alamiah dan jadi satu dengan pribadi orang masing-masing, biasanya disebut sebagai "sedulur papat lima pancer".

Yang kelima adalah diri sendiri "aku-nya" setiap orang, sedangkan yang empat adalah :

- a) amarah, sifat agresif dan mempertahankan diri
- b) aluamah, nafsu untuk survival badaniah (makan, minum, dsb.)
- c) sufiah, nafsu melestarikan jenis (sex - drive)
- d) mutmainah, nafsu untuk mencari kebenaran/keindahan subyektif.

Yang empat itu adalah kekuatan pendorong bagi usaha kelestarian hidup setiap mahluk, maka sangat essential baginya. Namun si "aku" harus mampu mengendalikan saudara-saudaranya yang empat itu agar tidak seperti kuda yang lepas mengejar kesenangan sendiri yang akhirnya akan membawa si "aku" tenggelam di dalam nafsu sendiri. Oleh karena itu Pancasila menghendaki pengendalian diri sebagai kunci mewujudkan kehidupan masyarakat yang seimbang, selaras dan serasi. Confucius menganjurkan "the golden mean" (jalan tengah) dan orang Jawa menganjurkan agar kita bersikap dan berlaku "sak madyo".

17. Melatih mengendalikan hawa nafsu adalah salah satu tehnik melatih rasa dengan mendewasakan emosi. Yang lain adalah mengolah budi pekerti, baik melalui ajaran agama ataupun dengan cara-cara lain. Salah satu cara dan sekaligus untuk membiasakan anak didik hidup bermasyarakat, menghayati apa artinya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif, mungkin dapat berwujud pengorganisasian kegiatan kurikuler dan di luarnya dalam kelompok-kelompok kecil. Guru berubah sifatnya menjadi tutor dan anak didik didorong untuk belajar secara aktif, mencari sendiri pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan setiap tahap kurikulum.

Span of control .....

Span of control sang guru akan lebih sempurna, dari mengawasi 40 atau lebih murid disatu kelas menjadi mengawasi 3 atau 4 kelompok murid. Guru juga akan sempat menolong murid-muridnya yang lemah dan kerja sama antar murid dalam memahami pelajaran akan terwujud dengan sendirinya. Dengan demikian secara wajar dapat diciptakan team-spirit. Untuk menjamin agar kelompok tetap demokratis sifatnya, setiap pergantian semester dirubah juga susunan kelompok.

Dengan demikian "tenggang rasa" akan dapat dikembangkan.

Barang tentu persaingan tidak hapus di dalam sistem kelompok itu, tetapi kiranya akan dapat terkendali menjadi persaingan yang sehat, dan bukan yang saling mematikan. Bahkan kerjasama akan lebih mudah dikembangkan.

18. Sebagaimana dapat dilihat di GBHN, pembauran ditempatkan di dalam bidang kebudayaan. Memang yang dikehendaki adalah terpeliharanya identitas itu. Jadi terbaur berarti kalau semua orang WNI-keturunan asing telah menghayati kebudayaan bangsa, berfikir dan berprilaku sebagaimana orang Indonesia pada umumnya.

Proses kearah itu panjang dan jalannya tidak selalu licin, namun bagaimanapun sukarnya harus ditempuh.

Maka tidak mengherankan bahwa MPRS menekankan pada sistem pendidikan Pancasila sebagai kunci kesatuan bangsa. Terserah kepada kita sekarang bagaimana harus menterjemahkan Pancasila kedalam sistem pendidikan. Menurut konsep masyarakat Pancasila adalah suatu "working society", masing-masing menurut kedudukan dan peranannya bekerja demi kesejahteraan semua.

Amerika Serikat yang menganut hak-hak azasi individu berhasil membangun kesejahteraan material, dan banyak yang menyebut bangsanya sebagai suatu "doing society".

Dalam masyarakat yang demikian, pedoman yang sering didengar oleh yang pernah sekolah di Amerika adalah "kalau kau tak tahu apa yang harus harus kau perbuat, berbuatlah sesuatu".

Dalam .....

Dalam rangka filsafat demikian yang penting adalah perbuatan, salah atau benar menjadi nomor 2. Cara berfikir Timur tidaklah demikian, perbuatan memang penting tetapi harus dilandasi dengan pikiran yang terang dan mantap.

Ini berarti bahwa kalau orang bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan, orang dianjurkan lebih dahulu bersikap tenang dan dalam keheningan pikiran berusaha memecahkan persoalan. Yang penting bukannya asal melangkah, tetapi langkah pertama, karena langkah pertama itu harus membawa kita kearah yang kita hendaki.

### P E N U T U P

1. Demikianlah kiranya tugas kita bersama untuk menjadikan pendidikan nasional sebagai sarana utama dalam mengsucceskan pembauran bangsa. Marilah kita dengan tenang melakukan re-evaluasi atas sistem pendidikan yang kita laksanakan sampai sekarang dan mempelajari alternatif apa saja yang terbuka untuk mewujudkan Sistem Pendidikan Pancasila.
2. Sistem itu harus mampu membuat manusia Indonesia sadar bermasyarakat dan bernegara, cerdas, luhur budi dan bijaksana dalam perilakunya. Manusia Indonesia harus pula aktif dan kreatif, demi survival diri sendiri dan bangsanya, karena sadar akan adanya pola kehidupan alam yang mengandung kerjasama, persaingan dan saling mematikan.
3. Agar dapat berbuat yang benar, ia harus utuh in body and soul, utuh material dan spiritual. Maka ia harus seimbang, seimbang antara rasio dan rasa, seimbang juga dalam jiwanya (antara si "aku" dengan hawa nafsunya) dan seimbang pula dengan masyarakat maupun alam sekitarnya dan akrab dalam hubungannya dengan Tuhan-nya.  
Dalam arti seperti di atas kami sepenuhnya mendukung program 5 K, yang dilandasi oleh logika, etikadan estetika.

---

Jakarta, 21 Oktober 1981.

# PEMBAURAN DI BIDANG PENDIDIKAN

oleh :  
K. Sindhunatha SH.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK ASIMILASI  
DIBIDANG PENDIDIKAN DAN PENGATURAN  
PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

1981

## PENBAURAN DIBIDANG PENDIDIKAN

### Pengertian Pembauran.

1. Pembauran bangsa menurut piagam asimilasi 1960 adalah proses penyatu-  
tu gabungan golongan-golongan masyarakat yang mempunyai sikap mental,  
adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan yang berbeda-  
beda menjadi suatu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna  
yang dalam hal kita adalah bangsa Indonesia.

Proses pembauran secara sosial psikologis berlangsung melalui tahap-  
tahap adaptasi - integrasi dan identifikasi.

2. Lambang Negara kita dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" melukis-  
kan kemajemukan unsur bangsa Indonesia, baik individu maupun go-  
longan/ kelompok suku dan etnis, yang sekaligus menjadi satu kesa-  
tuan bangsa Indonesia yang harus merasa satu, senasib dan sepenang-  
gungan, se Bangsa dan se Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam  
mencapai cita-cita bangsa dalam ruang lingkup Kawasan Nusantara.  
Ini berarti perlu adanya usaha terus menerus untuk membina solidari-  
tas bangsa.

Dengan demikian ke Bhineka Tunggal Ikaan bangsa kita mempunyai arti  
yang dinamis sesuai kenyataan hidup alamiah yang selalu berubah dan  
berkembang.

### Landasan dan Strategi Nasional Pembauran Bangsa.

3. Pembinaan Bangsa Indonesia yang ada pada hakekatnya secara sadar  
dicetuskan untuk pertama kalinya pada Hari Sumpah Pemuda 1928 yaitu  
28 Oktober 1928, didasarkan atas suatu landasan dan strategi yang  
jelas dan tegas sebagaimana terungkap di dalam pidato-pidato  
peletak-peletak dasar negara Republik Indonesia kita sewaktu mem-  
persiapkan Proklamasi Kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945 maupun sete-  
lah itu.

Oleh .....

Oleh almarhum Bung Karno dijelaskan bahwa Nasionalisme Indonesia adalah suatu "Nasionalisme Kenegaraan" atau "Staats Nasionalisme" yang diilhami antara lain oleh pengertian-pengertian pemikir-pemikir :

- Perancis, Ernest Renan dengan "Le Desir d'etre ensemble"
- Jerman, Otto Bauer dengan "Aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft"
- Douwes Dekker/Dr. Setiabudi dengan "Het land dat gij voedt is het land dat gij hoedt"

Ditambah dengan pengertian "Cinta Tanah Air-nya" Bung Karno sendiri.

Kemudian secara politis Maklumat Pemerintah R.I. Nopember 1945 yang dikeluarkan oleh almarhum Bung Hatta dengan jelas merumuskan bahwa kebijaksanaan Pemerintah R.I dalam membina bangsa Indonesia adalah antara lain menjadikan semua golongan Indo Asia, Indo Arab dan Indo Belanda patriot-patriot Indonesia yang sejati.

Landasan-landasan dan strategi pembinaan bangsa ini tidak pernah berubah dan terpancang kokoh di dalam ideologi negara kita Pancasila, Konstitusi negara kita UUD 1945, serta semboyan dan Lambang Negara kita Bhineka Tunggal Ika dengan Garuda Pancasila kita.

#### Pembauran dibidang Pendidikan.

4. Pendidikan dalam arti luas bagi seseorang antara lain berfungsi untuk memberikan dan meningkatkan kesadaran tentang hakekat hidup di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Tentang hak dan kewajibannya sebagai warganegara R.I. juga melalui proses pendidikan diharapkan diletakkan dasar-dasar dan dikembangkan sistim-sistim nilai yang esensial bagi setiap manusia Indonesia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan orang tuanya, sesamanya, dengan masyarakatnya dengan bumi, tanah air dan negaranya dan dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya dalam kehidupan internasional.

Dalam .....

Dalam rangka itu semua pendidikan memainkan peranan yang amat esensial dan strategi untuk dapat membina manusia-manusia Indonesia sesuai dengan landasan dan strategi pembinaan bangsa kita.

5. Pambauran dibidang pendidikan harus kita lihat sebagai suatu strategi nasional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan khususnya ditujukan untuk menyembuhkan salah satu sisa penyakit warisan kolonial yaitu masalah "pri" - "non-pri".

Masalah tersebut ditandai dan diwarnai oleh banyak sekali aspek yang bersifat psikologis emosional sehingga tidak bisa diselesaikan melalui cara-cara dan pendekatan secara rasional melulu maupun dengan peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi tertulis.

Pengaruh orang tua, lingkungan hidup, pengalaman pribadi baik dari anak didik maupun si pendidik mewarnai dan mempengaruhi pendekatan dan reaksi satu sama lain.

6. Kalau kita bicara tentang pambauran maka kita bicara tentang suatu masalah nasional yang menyangkut hubungan antara golongan masyarakat sesama warga anggota keluarga bangsa Indonesia yang tidak menyangkut warganegara asing. Oleh karena itu sudah akan terjadi suatu kesalahan psikologis yang cukup besar apabila masalah pambauran atau asimilasi dibicarakan atau ditempatkan dalam satu wadah dengan masalah warga negara asing dan pendidikan asing.

7. Pada saat ini kita terpaksa masih harus berbicara tentang pambauran "pri" - "Non-pri" oleh karena kita berada dalam suatu masa transisi yang selalu bersifat rawan. Masalah yang kita hadapi adalah suatu masalah "social engineering" yang harus ditangani secara konsisten dan bijaksana.

Para pembina penentu kebijaksanaan dan para ilmiawan boleh dan harus berbicara tentang masalah pambauran dengan bahasa dan istilah-istilah yang jelas.

Namun .....

Namun masyarakat yang dibina atau yang harus dibaurkan yaitu "pri" dan "non-pri" tidak boleh dan harus dihindarkan dari penggunaan bahasa dan istilah yang membeda-bedakan atau malahan mempertajam hubungan antara "pri" dan "non-pri".

Mass Media misalnya pada hakekatnya justru harus dilarang untuk berbicara tentang pembauran dan menggunakan peristilahan "pri" dan "no--pri" maupun istilah apapun yang memperlihatkan atau menonjolkan perbedaan antara sesama warga negara R.I. karena berbeda suku atau asal usul keturunan. Secara konsisten hanya boleh dibedakan antara MNI dan MNA.

8. Kebijakan pembauran dibidang pendidikan merupakan pula suatu kebijakan "Social engineerring" yang harus berjalan secara konsisten dan bijaksana. Dimana orang tua, pendidik/guru, pengurus sekolah/pemerintah harus dapat menjalin satu pengertian dan kerja sama yang bulat. Pembauran dibidang pendidikan formal pada hakekatnya tidak lain dari pada mengatur dan membina struktur murid sedemikian rupa sehingga yang disebut murid "non-pri" berada dalam jumlah yang lebih kecil dan tersebar merata disebanyak mungkin sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri.

Pengertian, kesepakatan bersama antara unsur pemerintah, pendidik/guru, pengurus sekolah dan orang tua murid harus menjadi pangkal tolak sebelum kebijakan mulai dijalankan.

9. Konsistensi pelaksanaan program pembauran dibidang pendidikan formal tidak lain berarti bahwa harus ada program jangka pendek - menengah - panjang yang mencakup semua sekolah yang ada, swasta dan negeri mulai dari tingkat TK s/d pendidikan tinggi.

10. Kebijakan



10. Kebijakan dalam pelaksanaan program pembauran berarti, bahwa program berjalan secara wajar tanpa menimbulkan gejolak, dimana para murid sama sekali tidak boleh disadarkan akan perbedaan asal usul atau suku bangsanya. Kebijakan yang penting adalah juga agar jangan dirumuskan peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi tertulis yang membeda-bedakan atau menonjolkan perbedaan asal usul keturunan atau suku bangsa. Juga penentuan quota yang "mati" adalah tidak bijaksana mengingat situasi dan kondisi lingkungan selalu harus diperhitungkan.
  
11. Pembauran dibidang pendidikan non-formal didasarkan atas prinsip-prinsip kebijakan yang sama dengan sasaran pokok agar anak-anak diberi kesempatan dan berada dalam suasana kehidupan pergaulan yang terbaur secara wajar dan terbuka tanpa prasangka-prasangka ras dan kesukuan.
  
12. Pendidikan nasional kita harus mampu menyuburkan sistim-sistim nilai baru bagi generasi muda kita yang bila perlu bertolak belakang dengan sistim nilai yang dianut oleh orang tuanya yang senantiasa tentu berusaha mewarisi sistim nilai yang dianutnya namun diperolehnya dalam situasi, kondisi dari alam kehidupan masa yang lampau yang pasti banyak diantaranya sudah tidak cocok malahan bertentangan dengan landasan dan strategi pembinaan bangsa dan negara merdeka Republik Indonesia.

Jakarta, 17 Oktober 1981

Ketua Umum Bakom-PKB Pusat  
K. Sindhunatha, S.H.

# PEMBAURAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PEMBINAAN KESATUAN BANGSA

oleh  
**A. Sudiharto Djiwandono**

( ~~Centre~~ for Strategie and International Studies )

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK ASIMILASI  
DIBIDANG PENDIDIKAN DAN PENGATURAN  
PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

**1981**

PEMBAURAN PENDIDIKAN  
DALAM RANGKA PEMBINAAN KESATUAN BANGSA\*

---

A. Sudiharto Djiwandono

(Centre for Strategic and International Studies)

Pendahuluan

Kita semua umumnya menyadari betapa pentingnya usaha pembauran dalam rangka pembinaan kesatuan dan persatuan Bangsa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan telah timbul kesadaran yang makin lama makin besar bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar dan kuat manakala kita mampu membina dan mengembangkan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara ini dengan segala keanekaragamannya, baik ditinjau dari segi kesukuan, kedaerahan, kepercayaan agama, cita-cita politik maupun asal keturunan.

Apa yang akhirnya tersurat dan tersirat di dalam Pembukaan UUD 1945 kiranya merupakan kristalisasi dari kesadaran tersebut, sehingga kita semua dan masing-masing pada dasarnya mempunyai kewajiban konstitusional dan moral untuk ikut serta dalam proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan fungsi dan posisi masing-masing dalam masyarakat. Kiranya kita tidak perlu menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dan kita hadapi

dalam .....

---

\* Ceramah pada Lokakarya Nasional Pembauran Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen P dan K, Jakarta, 26 sampai dengan 28 Oktober 1981.

dalam masalah ini, bahkan sebaliknya sangat diperlukan sikap yang terbuka sehingga kita mampu melihat masalahnya secara lebih jernih dalam usaha mencari dan menemukan jalan dan/atau cara-cara pendekatan yang sesuai dan dengan demikian usaha tersebut menjadi lebih berdaya guna.

Dalam hubungan ini kita melihat bahwa proses integrasi nasional tidak selalu berjalan lancar, antara lain terbukti dengan masih sering timbulnya-benturan benturan sosial dalam perjalanan sejarah negara kita, yang apabila ditelusuri bermotifkan salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor perbedaan yang secara potensial memang bersifat disintegratif seperti kesukuan/kedaerahan, agama maupun asal keturunan (rasialisme).

Sebagaimana kita pada umumnya mengetahui bahwa usaha-usaha untuk mengatasi masalah pembauran antara golongan pribumi dan non-pribumi, telah banyak dilakukan melalui berbagai kegiatan dan saluran, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Dan apabila sejauh ini usaha-usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil kiranya dapat dimengerti mengingat sifat permasalahannya yang cukup kompleks karena secara langsung menyangkut sikap, pandangan dan perilaku manusia. Mengubah sesuatu pandangan dan sikap yang telah terbentuk dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang tentu memerlukan waktu yang lama, lebih-lebih dalam suasana demokrasi sesuai dengan falsafah Pancasila kita, proses itu harus berjalan wajar tanpa unsur-unsur paksaan yang memperkosa hak-hak kemanusiaan setiap anggota masyarakat, baik yang asli maupun yang keturunan asing.

Disini kita melihat bahwa pendekatan melalui bidang pendidikan merupakan pendekatan yang sangat tepat karena berbagai alasan, tetapi yang paling menonjol ialah bahwa masalah pembinaan kesatuan bangsa pada dasarnya merupakan masalah menumbuhkan, membina dan mengembangkan suatu sikap mental tertentu.

Masalah .....

Masalah ini pada tempat pertama adalah masalah pendidikan dan oleh karena itu adalah sangat wajar apabila bidang pendidikan diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam proses pembauran dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Tetapi hal ini tentu tidak dapat diartikan bahwa pendekatan pendidikan merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh, lebih-lebih apabila pendidikan hanya diartikan pendidikan formal saja. Keberhasilan usaha ini akan banyak dipengaruhi pula oleh iklim dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan yang perlu diciptakan secara sadar melalui berbagai jalan dan kebijaksanaan di luar bidang pendidikan, antara lain bidang kehidupan ekonomi yang umumnya dipandang sebagai salah satu aspek kehidupan yang berpengaruh besar dalam proses pembauran antara golongan pribumi dan non-pribumi.

#### Pembauran di Bidang Ekonomi

Pada umumnya gejala yang paling menonjol dan paling dirasakan dalam masyarakat dan dipandang sebagai hambatan utama dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa adalah kenyataan tidak adanya keselarasan dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat, khususnya antara golongan pribumi dan golongan non-pribumi (keturunan Cina).

Citra tentang tidak adanya keselarasan di bidang ekonomi ini nampak begitu kuat, tidak saja di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan Pemerintah. Hal ini dapat dimengerti, bukan hanya karena keadaan umum dalam masyarakat menunjukkan adanya kenyataan itu tetapi juga karena citra yang demikian sudah terbentuk cukup lama dalam masyarakat.

Direktur .....

Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri pada kesempatan menutup Pekan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Tingkat Nasional pada tanggal 26 September 1981 antara lain juga mengemukakan bahwa timbulnya keresahan sosial pada hakekatnya lebih banyak disebabkan oleh citra tidak adanya keselarasan di bidang ekonomi di dalam masyarakat. Ada selapisan kecil masyarakat mempunyai kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional, sedangkan di pihak lain sebagian besar masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah berperanan besar dalam kegiatan perekonomian nasional.  
(Antara, 28 - 9 - 1981).

Kita juga mencatat bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan APBN yang kemudian disempurnakan dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1981 dikeluarkan dalam rangka membantu pengusaha golongan ekonomi lemah (yang umumnya terdiri dari pengusaha pribumi), dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk mendorong pembauran di bidang ekonomi.

Adapun yang dimaksud dengan pembauran di bidang ekonomi, menurut penjelasan Dirjen Sospol Depdagri, pada hakekatnya adalah penyatupaduan kerampuan ekonomi individual atau golongan yang berbeda tingkat kehidupan ekonominya, sebagai akibat logis dari perasaan kegotongroyongan, perasaan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa di daerah-daerah tertentu dimana perbedaan tingkat dalam kehidupan ekonomi antara golongan pribumi dan non-pribumi relatif kecil, proses pembauran nampak lebih lancar dan wajar. Mereka saling menerima sebagai sesama warga negara dan anggota masyarakat sehingga terjadi interaksi sosial yang wajar.

Oleh karena .....

Oleh karena itu kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong pembauran di bidang ekonomi tersebut sudah sepantasnya mendapatkan dukungan dari masyarakat, lebih-lebih lagi pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan sudah semestinya melaksanakan kebijaksanaan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud yang hendak dicapai. Kebijaksanaan tersebut merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan asas pemerataan dalam pembangunan nasional, khususnya pemerataan kesempatan berusaha.

#### Pembauran Pendidikan.

Apabila pembauran di bidang ekonomi ditinjau dari segi pembinaan kesatuan bangsa merupakan usaha yang secara langsung tertuju kepada terciptanya keselarasan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai salah satu aspek kehidupan masyarakat yang besar pengaruhnya terhadap proses pembauran pada umumnya, pembauran di bidang pendidikan merupakan usaha yang tidak kalah penting dan strategisnya.

Mengingat hakekat pendidikan nasional sebagai usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, program pembauran pendidikan dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa pada hakekatnya tertuju kepada sesuatu yang lebih mendasar sifatnya, menyentuh aspek yang paling dalam pada diri manusia. Hal ini secara jelas dirumuskan dalam tujuan asimilasi pendidikan yang berbunyi :

a. Menimbulkan dan memupuk kesamaan nilai, sikap dan perilaku sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, senasib seperjuangan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad bersama mencanai cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila.

b. Menimbulkan ....

- b. Menimbulkan perasaan sebagai anggota/bagian dari masyarakat bangsa Indonesia seutuhnya, sehingga tercipta peri kehidupan yang sesuai dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.

Dari rumusan tentang tujuan asimilasi pendidikan tersebut jelas bahwa dengan program pembauran pendidikan tidaklah cukup dengan sekedar membaurkan anak didik dari berbagai suku maupun asal keturunan, meskipun langkah demikian merupakan langkah penting yang harus diambil dalam rangka pelaksanaan program pembauran pendidikan. Sesuai dengan tujuannya, pembauran tersebut harus diisi dan diarahkan sedemikian rupa sehingga mampu menimbulkan dan memupuk kesamaan nilai, sikap dan perilaku sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tentu menyangkut materi/isi dan metoda pendidikan serta penciptaan iklim yang sehat yang memungkinkan berkembangnya pengertian dan perasaan yang sesuai dengan ide persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini penting karena untuk menimbulkan dan memupuk kesamaan nilai, sikap dan perilaku merupakan usaha yang tidak hanya bersangkutan dengan pengertian rasional, tetapi sesuatu yang dimengerti tersebut juga harus dapat dihayati secara emosional, sehingga secara otomatis akan tercermin dalam sikap dan tingkah laku secara nyata. Ini sesuai dengan rumusan tentang tujuan asimilasi pendidikan seperti dikutip di muka khususnya butir b, yaitu menimbulkan perasaan sebagai anggota/bagian dari masyarakat bangsa Indonesia seutuhnya, dan seterusnya. Proses ke arah penghayatan emosional tersebut perlu ditunjang oleh iklim yang sehat seperti telah dikemukakan.

Masalah pembauran dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa pada hakekatnya adalah masalah hubungan antar manusia, dalam hal ini masalah hubungan antara warga negara asli dan warga negara keturunan asing.

Di sini .....



Di sini diharapkan terbinanya suatu hubungan yang serasi, selaras dan seimbang berdasarkan kesamaan nilai, pandangan, sikap, dan cita-cita sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha pembauran, termasuk pembauran di bidang pendidikan haruslah diarahkan pada terbinanya hubungan yang serasi diantara golongan-golongan dalam masyarakat, khususnya antara golongan pribumi dan non-pribumi. Keserasian hubungan ini timbul karena adanya kesamaan dalam nilai, pandangan dan cita-cita, perasaan senasib seperjuangan serta perasaan sebagai anggota masyarakat bangsa Indonesia seutuhnya.

#### Hambatan-hambatan.

Apabila sampai saat ini kita melihat dan merasakan bahwa keserasian hubungan antar warga negara asli dan warga negara keturunan asing (pribumi - non-pribumi) itu belum sepenuhnya terwujud dalam masyarakat, hal itu perlu mendapatkan perhatian kita bersama, meskipun kita juga menyadari, sebagaimana dalam pendahuluan telah dikemukakan, proses itu merupakan proses yang makan waktu karena sifat permasalahannya yang menyangkut sikap mental manusia yang telah terbentuk selama proses yang panjang.

Namun demi kepentingan kita sebagai bangsa yang telah bertekad untuk mempersatukan seluruh tumpah darah dan seluruh bangsa dalam satu kesatuan yang utuh, kukuh, kuat dan memiliki ketahanan yang tangguh, proses ini harus dipercepat dan makin dimantapkan.

Dalam hubungan ini Resolusi MPRS Nomor III/Res.MPRS/1966 yang juga menjadi salah satu dasar program pembauran di bidang pendidikan antara lain menyebutkan : "mempercepat proses integrasi melalui asimilasi warga negara keturunan asing, dengan menghapuskan segala hambatan-hambatan yang mengakibatkan yang tidak harmonis dengan warga negara asli (pasal 4)".

Resolusi .....

Resolusi MPRS tersebut secara jelas mengamanatkan bahwa proses integrasi nasional melalui asimilasi/pembauran perlu dipercepat dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada, ialah hal-hal ataupun keadaan yang mengakibatkan ketidakserasian hubungan antara warga negara asli dengan warga negara keturunan asing.

Kiranya menjadi kewajiban kita untuk memikirkan dan mengintifisir hambatan-hambatan dimaksud agar dengan demikian dapat dipikirkan lebih lanjut cara-cara pendekatan yang lebih efektif dalam usaha mempercepat proses pembauran dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu hal yang umumnya dipandang sebagai hambatan yang besar dalam masalah ini ialah tidak adanya keselarasan dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat antara golongan pribumi dan golongan non-pribumi seperti di muka telah diuraikan. Hambatan ini perlu diatasi, antara lain melalui kebijaksanaan Pemerintah yang diarahkan pada pemerataan kesempatan berusaha, antara lain dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pengusaha pribumi untuk mengembangkan diri sehingga mereka memiliki ketrampilan dan kemampuan yang memadai dan mampu bersaing secara wajar dan sehat.

Di muka telah dikemukakan bahwa kebijaksanaan dan usaha ini perlu didukung dan lebih ditingkatkan karena keberhasilannya kecuali akan lebih meningkatkan ketahanan kita di bidang ekonomi juga akan lebih memperlancar dan mempercepat proses pembauran dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam hubungannya dengan program pembauran di bidang pendidikan, sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, perhatian kiranya perlu dititikberatkan pada hambatan-hambatan yang bersumber pada suasana mental dan kejiwaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku masing-masing, baik yang pribumi maupun yang non-pribumi.

Hal ini .....

Hal ini sesuai dengan tujuan program pembauran pendidikan yang pada pokoknya diarahkan pada pembinaan sikap mental sehingga tumbuh dan berkembang suatu kesamaan nilai, pandangan, dan cita-cita sebagai satu kesatuan bangsa, sebagai faktor-faktor yang menentukan tumbuhnya sikap dan perilaku sebagaimana diharapkan.

Dalam mengamati masalah ini kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dari kedua belah pihak, baik pada golongan non-pribumi maupun pada golongan pribumi, terdapat "hambatan mental psikologis" yang mengakibatkan adanya semacam jarak yang memisahkan satu sama lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antar manusia akan berjalan lancar dan wajar apabila pada diri manusia-manusia yang bersangkutan tidak ada sesuatu "ganjalan" berupa sikap atau pandangan yang apriori dari yang satu terhadap lainnya. Selanjutnya juga diperlukan suatu sikap dan perilaku secara nyata (lahiriah) yang memanasifestasikan kehendak untuk saling berhubungan secara baik dan wajar. Prinsip ini pada dasarnya berlaku juga dalam masalah pembauran dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan.

Kedua pihak perlu dibebaskan atau membebaskan diri dari sikap dan pandangan yang apriori dari yang satu terhadap lainnya, atau dengan perkataan lain perlu dihilangkannya prasangka yang menghalangi terciptanya hubungan yang wajar. Prasangka adalah suatu anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum seseorang mengetahui, menyaksikan ataupun menyelidiki sendiri sesuatu itu. Prasangka telah membuat orang berpikir dan mengambil sikap dalam suatu pola tertentu yang negatif, dan sering kali membuat dirinya tertutup terhadap pandangan lain yang tidak sesuai dengan pola yang dianutnya, tidak peduli apakah pandangan lain itu rasional dan secara obyektif benar.

Ernst M. Wallner .....

Ernst M. Wallner dalam artikelnya yang berjudul "Prejudice and Society" dalam Education, vol. II, 1975, antara lain mengemukakan bahwa : prasangka itu selalu berkenaan dengan penilaian atau sikap dari kelompok yang satu terhadap kelompok lain yang termasuk dalam kategori tertentu, suatu penilaian yang menganggap rendah atau sikap yang tidak bersahabat atas dasar perbedaan suku, ras, agama, tingkatan sosial, maupun ideologi atau jenis kelamin.

Sikap yang demikian, yang timbul karena adanya pra-anggapan yang kurang baik dari yang satu terhadap lainnya tentu tidak memungkinkan terciptanya suatu hubungan yang baik dan wajar dalam pergaulan masyarakat, dengan perkataan lain tidak memungkinkan terjadinya suatu pembauran yang diharapkan.

Namun kita juga menyadari bahwa usaha untuk menghilangkan sikap dan anggapan yang demikian baik dari golongan pribumi maupun dari golongan non-pribumi merupakan suatu usaha yang pelik dan makan waktu, di samping juga merupakan usaha yang tidak dapat berdiri sendiri. Keberhasilan usaha ini akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, oleh situasi dan iklim secara keseluruhan. Meskipun demikian tetap perlu adanya usaha agar sadar kearah dihilangkannya prasangka tersebut, antara lain melalui kegiatan pendidikan. Seluruh iklim pendidikan kita hendaknya dapat menunjang dan mendorong makin menipisnya prasangka dari kedua belah pihak dan makin mendekatkan satu sama lain.

Tugas ini memang merupakan tugas yang tidak ringan dan hanya dapat ditanamkan secara lambat laun melalui pemberian pengertian, kesadaran dan pendalaman akan nilai-nilai serta pemberian contoh secara konkrit. Kesulitan ini terutama disebabkan karena sikap dan anggapan yang kita sebut prasangka tadi tumbuh dan berkembang dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang dan melalui proses interaksi sosial seolah-olah dilestarikan dari generasi kegenerasi.

Dengan .....

Dengan menelusuri kembali sejarah pertumbuhan bangsa kita terutama sejak kedatangan orang-orang Tionghoa perantaraan dan policy pemerintah kolonial pada waktu itu dalam masalah Tionghoa, kita mendapatkan gambaran dan dapat mengerti mengapa prasangka itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga pada umumnya pembauran di antara kedua golongan itu sulit berlangsung kecuali pada bagian kecil karena kondisi dan situasi tertentu yang menguntungkan.

Sebagai pendatang-pendatang baru dengan latar belakang kebudayaan yang lain, bisa dimengerti apabila mereka menunjukkan tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan yang dalam pandangan masyarakat (asli) dianggap kurang baik. Lebih-lebih pada masa lalu dimana adat dan tradisi masih sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang baru yang datang dari luar lingkungannya hampir selalu menimbulkan perasaan curiga yang dapat berkembang menjadi antipati bahkan sikap permusuhan.

Keadaan ini lebih dipertajam lagi oleh policy pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu yang dalam rangka kepentingan politik penjajahannya telah menempatkan penduduk golongan Tionghoa dan golongan Timur Asing lainnya pada tempat dan kedudukan yang berbeda (di atas) golongan pribumi. Bagi mereka diberlakukan pengaturan-pengaturan dan perlakuan-perlakuan khusus, di bidang hukum, bidang pendidikan, bidang usaha, pemukiman, dan di bidang-bidang kehidupan lainnya, pendeknya hal-hal yang memisahkan diantara kedua golongan penduduk dan yang berakibat makin mempertebal rasa antipati, terutama dari golongan pribumi terhadap golongan non-pribumi.

Situasi demikianlah yang kita warisi pada saat kita mencapai kemerdekaan nasional pada tanggal 17 Agustus 1945, sementara kita telah bertekad untuk menerima dan melaksanakan prinsip integralistik dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita.

Hambatan .....

Hambatan lain yang dapat dikategorikan sebagai "hambatan mental psikologis" ialah apa yang oleh sementara ahli disebut sebagai identifikasi sosial, ialah sikap dan tingkah laku, khususnya pada golongan non-pribumi, yang memanasikan suatu sikap dasar di pihak mana ia sebenarnya berada atau menempatkan diri. Sebagaimana dikatakan oleh G. William Skinner yang dikutip dalam Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, oleh Nely G. Tan (Ed), Jakarta, 1979, "Di Indonesia seorang keturunan Tionghoa disebut orang Tionghoa, jika ia bertindak sebagai anggota dari mengidentifikasi dirinya dengan masyarakat Tionghoa". Dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat pada umumnya memang nampak bahwa seorang Tionghoa (BNI Keturunan /sing) dapat diterima secara wajar oleh masyarakat lingkungannya dan dapat bergaul atau berinteraksi dengan sesama warga masyarakat dengan lancar dan tanpa prasangka karena dalam hidup sehari-hari ia bersikap dan bertingkah laku begitu wajar dan membaaur dengan masyarakatnya tanpa menunjukkan sikap dan tingkah laku ketionghoan. Meskipun secara fisik mungkin ia masih memperlihatkan ciri-ciri khasnya seperti warna kulit, bentuk mata dan ciri-ciri fisik lainnya.

Dalam hubungan ini maka eksklusivisme sering kali dicela sebagai penghambat proses pembaauran karena dengan hidup secara eksklusif akan membawa akibat langsung maupun tak langsung melestarikan sikap-sikap, pandangan, kebiasaan maupun tingkah laku kelompok/golongan sehingga identifikasi sosial mereka akan tetap sebagai seorang Tionghoa dan tidak sebagai seorang Indonesia. Selanjutnya pelestarian identifikasi sosial yang demikian akan berarti juga pelestarian prasangka di pihak lain, dan dalam situasi demikian sulit diharapkan berjalannya proses pembaauran dalam rangka kesatuan bangsa dan makin menjauhkan kita dari cita-cita untuk membangun suatu bangsa yang besar, utuh dan bersatu tanpa mengingkari adanya kebhinekaan di dalamnya.

Beberapa .....

### Beberapa Catatan Penutup.

Sebagaimana di muka telah dikemukakan, program pembauran pendidikan dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa pada hakekatnya bersifat mendasar karena menyentuh aspek yang paling dalam pada diri manusia. Usaha dan kegiatan ini bersangkutan-paut dengan pembinaan mental, mengubah, mengisi dan memperkembangkan sikap, pandangan dan perilaku dari yang tidak atau kurang sesuai ke arah sikap, pandangan dan perilaku yang sesuai dengan ide persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karenanya kita semua menyadari bahwa pelaksanaan program pembauran di bidang pendidikan tentulah tidak dimaksudkan untuk sekedar membubarkan sekolah-sekolah yang bersifat eksklusif rasial dan membaurkan para pelajarnya pada sekolah-sekolah lain yang ditentukan, tetapi jelas lebih dari itu.

Tindakan dan kebijaksanaan Pemerintah untuk menutup semua sekolah yang eksklusif rasial pada tahun 1967 dan kemudian diikuti oleh program pembauran pendidikan adalah tepat dan perlu diteruskan serta ditingkatkan. Seperti telah disinggung di muka, Setiap bentuk eksklusivisme rasial akan menghambat proses pembauran.

Dalam hal ini berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di muka, peningkatan maupun pemantapan hendaknya merangkum isi dan arah pembauran pendidikan, antara lain ke arah dihilangkannya prasangka di satu pihak dan dikembangkannya identifikasi sosial yang positif dan relevan seperti telah diuraikan di muka.

Hal ini tentulah menyangkut materi pendidikan, metodologi, pemberian contoh oleh para pengelola dan para pendidik, serta penciptaan iklim yang sehat dan edukatif yang memungkinkan timbul dan berjalan lancarnya proses penghayatan akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada anak didik, dalam aspek rasional maupun emosionalnya.

Dalam .....

Dalam hubungan ini perlu kiranya kita ingat kembali bahwa : Pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengusahakan perkembangan kehidupan beragama, kehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya, pengetahuan, ketrampilan, daya estetik dan jasmaninya sehingga ia dapat mengembangkan dirinya dan bersama dengan sesama manusia membangun masyarakatnya serta membudayakan alam sekitarnya (Laporan KPPN, hal 16 - 17).

Selanjutnya, pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pelaksanaan sebagai berikut :

1. Asas semesta, menyeluruh, dan terpadu, yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa;
2. Asas pendidikan seumur hidup;
3. Asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
4. Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat;
5. Asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan nusantara;
6. Asas Bhineka Tunggal Ika;
7. Asas keselarasan, keseimbangan dan keserasian;
8. Asas manfaat, adil, dan merata yang meliputi asas non-diskriminatif, yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi, baik atas dasar kesukuan, daerah, keturunan, derajat, jenis kelamin, dan kekayaan maupun atas dasar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
9. Asas .....



9. Asas ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, yang berarti bahwa seorang pendidik harus memberi teladan di depan, memberi motivasi di tengah, dan mengawasi dari belakang;
10. Asas mobilitas, efisiensi, efektivitas, yang memungkinkan penganfaatan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap manusia Indonesia;
11. Asas kepastian hukum, yang berarti bahwa sistem pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan (Laporan KPPN, hal 17).

Bertolak dari pengertian, tujuan serta asas-asas pendidikan nasional tersebut kita melihat bahwa usaha pembinaan kesatuan bangsa melalui pembauran pendidikan adalah sangat tepat dan sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri.

Sejalan dengan asas-asas pendidikan nasional, khususnya asas pendidikan seumur hidup, asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah, asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat, asas Bhineka Tunggal Ika, serta asa manfaat, adil dan merata yang meliputi asas nondiskriminatif, yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi, baik atas dasar kesukuan, daerah keturunan, derajat, jenis kelamin, dan kekayaan maupun atas dasar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ide tentang pembauran pendidikan ini seharusnya diberi dimensi yang lebih luas.

Sebagai ide ia perlu dikembangkan juga pada jalur-jalur pendidikan lain di luar jalur pendidikan formal sampai menjangkau lingkungan rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Penanaman kesadaran akan nilai-nilai asasi sebagaimana terkandung dalam dasar negara Pancasila, termasuk nilai persatuan Indonesia, dan sekaligus menghilangkan prasangka serta membina identifikasi sosial yang positif haruslah dilakukan tidak hanya melalui jalur pendidikan formal tetapi juga jalur pendidikan non-formal dan in formal, lebih-lebih dilingkungan keluarga.

Tanpa .....

Tanpa mengurangi arti dan peranan jalur pendidikan formal, kita semua pasti sependapat bahwa dari lingkungan keluarga yang sehat, yang memiliki kesadaran tinggi akan nilai-nilai luhur bangsa dan yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu diliputi oleh iklim yang mencerminkan kesadaran tersebut, dapat diharapkan lahirnya manusia-manusia Indonesia yang bebas dari prasangka-prasangka rasial dan yang selalu mengidentifikasi dirinya sebagai manusia Indonesia seutuhnya dalam sikap, pandangan dan perilakunya.

Jakarta, 26 Oktober 1981.

**PEMBAURAN DI BIDANG PENDIDIKAN  
SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS**

oleh :  
**Dr. Mely G. TAN**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK ASIMILASI  
DIBIDANG PENDIDIKAN DAN PENGATURAN  
PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

**1981**

PEMBAURAN DI BIDANG PENDIDIKAN  
SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS

Hely G. Tan \*)

PENDAHULUAN

Umum diakui bahwa pendidikan dalam arti yang seluasnya, merupakan pranata yang paling ampuh sebagai wadah proses pemersatuan suatu bangsa. Melalui pendidikan formal, khususnya di sekolah, dan pendidikan non-formal, khususnya dalam keluarga, generasi muda memperoleh pengetahuan, ketrampilan serta menyerap sistem nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa dengan kebudayaan yang khas, banyak tergantung dari keberhasilan-gunaan sistem pendidikan dan proses sosialisasi ini.

Di masyarakat yang beraneka ragam seperti Indonesia, yang terdiri dari kurang lebih 300 suku bangsa yang masing-masing mempunyai ciri-ciri kebudayaan yang khas, pendidikan memainkan peranan kunci dalam proses pemersatuan berbagai kelompok ini.

Indonesia dalam hal ini patut bersyukur dengan adanya kesadaran tentang keaneka-ragaman ini yang tercermin dalam lambang Bhineka Tunggal Ika, dan sekaligus kesadaran tentang pentingnya kesatuan dan persatuan yang terwujud dalam Sumpah Pemuda.

Dalam makalah yang singkat ini, kami bertitik tolak dari anggapan bahwa proses pemersatuan bangsa Indonesia dari segi sosial budaya dan ekonomis, masih tengah berlangsung dan menyangkut semua suku bangsa yang merupakan bagian dari masyarakatnya, <sup>1)</sup> walaupun dalam seminar ini fokusnya khusus kepada golongan ethnias Tionghoa.

---

\*) Staf Peneliti Senior LEKNAS - LIPI.

Mengenai masalah golongan ethnias Tionghoa ini, kami mengambil sebagai sasaran pembahasan, mereka yang warga negara Republik Indonesia (WNI), sedangkan mereka yang warga negara asing tidak termasuk dalam pembahasan ini. Memang perlu disadari bahwa mereka yang WNI tidak merupakan suatu kelompok yang monolitik. Mereka merupakan kelompok yang heterogen, yang dari segi orientasi kebudayaannya merupakan suatu kontinum, dari mereka yang orientasi kebudayaannya serta identifikasinya seluruhnya sebagai orang Indonesia, kepada mereka yang mempunyai orientasi kebudayaan Indonesia dengan beberapa unsur kebudayaan nenek-moyangnya dan mengidentifikasi dirinya sebagai peranakan, sampai ke mereka yang mempunyai orientasi kebudayaan yang kebanyakan berasal dari kebudayaan nenek-moyangnya dan mengidentifikasi dirinya sebagai totok. Dalam kelompok totok ini terutama termasuk mereka yang lahir di Indonesia dari orang tua yang lahir di luar Indonesia, dan mereka yang menjadi WNI lewat pewarganegaraan (termasuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan atas dasar IMPRES No. 2/1980 dan KEPPRES No. 13/1980). 2)

- 1) Lihatlah Risalah Hasil Seminar Pengembangan Kebudayaan dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta, 17 - 20 Juli 1978. Seminar ini diselenggarakan dengan kerjasama antara LIPI, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Juga nomor khusus PRISMA yang berjudul Integrasi Nasional di Tengah Persaingan Kesetiaan, Tahun V, No. 8, Agustus 1976.
- 2) Lihatlah tulisan kami yang berjudul "Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia", PRISMA, Tahun V, No. 8, Agustus 1976, hl. 24 - 40, dan Kata Pengantar dalam buku Golongan Ethnis Tionghoa di Indonesia : Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa, Jakarta : Gramedia, 1980 (Cetakan kedua).

Mengenai pendidikan, seperti dikemukakan di atas, kami menggunakan dalam arti luas, mencakup pengetahuan dan ketrampilan serta pembentukan kepribadian yang diperoleh di sekolah, dalam keluarga, dan dalam lingkungan sosial.

Mengenai pembauran pendidikan, kami melihat bahwa dalam kenyataan yang ditekankan adalah pembauran dalam arti persentase tertentu murid dari golongan etnis Tionghoa dan etnis Indonesia dalam satu sekolah, sedangkan pada hemat kami yang sama pentingnya, atau bahkan lebih penting adalah sikap dan perilaku guru serta orang tua murid dan kurikulum serta isi pelajaran, terutama yang berhubungan dengan mata pelajaran civics dan ilmu pengetahuan sosial dan kebudayaan.

Berhubung kami beranggapan bahwa proses pembauran pada hakekatnya bertalian dengan proses konvergensi sistem nilai sosial dan budaya dari dua atau lebih kelompok kebudayaan, kami akan memberikan gambaran tentang sistem nilai sosial dan budaya yang bertalian dengan pendidikan yang mencakup sikap mengenai dan aspirasi terhadap pendidikan dari golongan etnis Tionghoa serta perwujudan dalam pemilihan dan preferensi pendidikan.

Berdasarkan gambaran ini kami akan memberikan kesimpulan dan saran-saran, yang didasarkan atas keinginan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha menanggulangi masalah pembauran dalam bidang pendidikan, suatu masalah yang jelas perlu ditangani oleh semua kelompok yang bersangkutan.

#### SIKAP MENGENAI DAN ASPIRASI TERHADAP PENDIDIKAN

Suatu pengamatan yang umum dikemukakan adalah bahwa performance murid golongan etnis Tionghoa, pada pendidikan tingkat rendah sampai ke perguruan tinggi, secara relatif cukup menyolok.

Jika .....

Jika menelusuri sebab-sebabnya, maka kita lihat bahwa pada umumnya anak-anak golongan tersebut mendapat dukungan yang kuat dari orang tuanya untuk belajar dengan baik, berkelakuan rajin dan disiplin. <sup>3)</sup> Ini tidak hanya terdapat pada mereka yang mampu, dengan orang tua yang terdidik, tapi juga pada mereka yang tidak mampu dan orang tuanya tidak/kurang terdidik.

Perilaku demikian mempunyai dasar dasarnya dalam sistem nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam golongan tersebut. Walaupun pada kebanyakan dari mereka asal-usul sistem nilai itu tidak diketahui lagi, dan hanya dianggap sebagai sikap dan perilaku yang diturunkan dari nenek-moyangnya, kita mengetahui bahwa dasar-dasarnya terletak pada ajaran Confusius (atau Konghucu dalam bahasa Hokkian yang digunakan di sini), mengenai kebaktian terhadap orang tua (filial piety, atau hao dalam bahasa Hokkian dan hsiao dalam bahasa Mandarin). Pengertian ini yang dianggap sebagai salah satu ajaran utama dari Confusius, merupakan dasar dari sistem keluarga/kerabat Tionghoa yang bersifat patrilineal, patrilokal dimana kehidupan individu seyogyanya ditujukan untuk kebaikan dan keharuman keluarga, khususnya orang tua. <sup>4)</sup>

Hal ini berarti bahwa tiap anak harus berusaha sekuatnya agar ia dapat meningkatkan kedudukan dirinya dalam masyarakat dan dengan demikian memberikan kepuasan dan kegembiraan kepada orang tuanya. Untuk mencapai hasil ini, orang tuanya, sebaiknya, mendukungnya dengan segala kemampuannya, bahkan dengan segala pengorbanan, jika diperlukan.

---

3) Lihatlah ringkasan skripsi Fakultas Sastra, Jurusan Antropologi dari Pauline Ratna Hendrati, "Perbedaan Orientasi Nilai-budaya antara Generasi Muda dan Orang Tua Golongan Keturunan Tionghoa", diterbitkan oleh LEKNAS - LIPI, 1975.

4) Kenneth Scott Latourette, 1947, h1. 670.

Olga Lang, h1. 24 - 29.

Di samping pengertian kebaktian terhadap orang tua, terdapat suatu sikap terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan yang juga berasal dari Confucianisme, ialah nilai tinggi yang diberikan kepada ilmuwan atau literati. Menurut stratifikasi sosial masyarakat Tionghoa tradisional, kaum ilmuwan atau literati ini menempati kedudukan teratas, kemudian petani, pengrajin dan baru pedagang. <sup>5)</sup>

Penilaian yang tinggi terhadap ilmu dan ilmuwan ini, digabung dengan sistem keluarga yang menekankan kebaktian terhadap orang tua, merupakan dua unsur penting dalam sistem nilai sosial dan budaya golongan etnis Tionghoa yang mendorong terciptanya apa yang oleh McClelland dinamakan "achievement motivation", <sup>6)</sup> keinginan untuk memberi performance sebaik mungkin dan mencapai tujuan setinggi mungkin.

#### PEMILIHAN DAN PREFERENSI PENDIDIKAN

Jika kita pelajari peranan pendidikan dalam golongan etnis Tionghoa, terlihat bahwa pada zaman Belanda mereka terpaksa mengatur sendiri pendidikan anaknya, karena baru pada tahun 1908, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang khusus untuk mereka, ialah Hollands-Chinese School (HCS). Kita mengetahui bahwa sistem pendidikan pemerintah Belanda didasarkan atas pemisahan menurut ras, sehingga ada sekolah khusus untuk anak Belanda, anak Indonesia dan anak Tionghoa.

---

5) Kenneth Scoot Latourete, op.cit, hl. 687.

6) David McClelland, *The Achieving Society*, New York, The Free Press, 1961.

Lihatlah Mely G.Tan dan Leo Suryadinata, "The 'Special Project National School' in Jakarta", makalah yang diberikan pada 28 th Orientalists Congress di Canberra, Januari 1971, dan "Indonesian Chinese Education: Past and Present", oleh Leo Suryadinata, dalam buku *The Chinese Minority in Indonesia*, Chopmen Enterprises, 1978.



Namun, kalau kita mempelajari susunan murid sekolah-sekolah tersebut, ternyata bahwa sebenarnya setiap sekolah khusus itu mempunyai murid dari bangsa lainnya (lihat tabel-tabel pada akhir makalah), walaupun persentasenya kecil. Kemungkinan interaksi antar golongan ini lebih besar pada tingkat sekolah menengah, terutama pada sekolah MULO, di mana malahan murid ethnias Indonesia yang terbanyak. Pada tingkat universitas kemungkinan interaksi lebih besar lagi, dimana dari tahun 1930 - 1940 mahasiswa ethnias Indonesia, merupakan kurang lebih 50% dan ethnias Tionghoa dan Eropa masing-masing 25%. Demikian pula gambaran mengenai mereka yang lulus dari universitas.

Gambaran mengenai pendidikan pada zaman Belanda ini memperlihatkan bahwa sedikitnya di sekolah berbahasa Belanda, yang negeri maupun swasta, terdapat kemungkinan interaksi antara golongan ethnias Indonesia dan golongan ethnias Tionghoa, terutama pada tingkat universitas. Namun pilihan pendidikan bagi anak golongan ethnias Tionghoa tidak hanya pada sekolah berbahasa melayu, karena pada tahun 1901 didirikan sekolah oleh golongan ethnias Tionghoa.

Dengan demikian golongan ethnias Tionghoa pada waktu itu, mempunyai pilihan antara 3 jenis sekolah. Pada zaman pendudukan Jepang, pilihan ini menjadi dua : Bahasa Indonesia dan Bahasa Tionghoa, dan kebanyakan memilih jenis yang kedua. Keadaan ini dilanjutkan sesudah terbentuknya Republik Indonesia, dan menurut data tahun 1957 terdapat kurang lebih 2.000 sekolah berbahasa Tionghoa dengan 425.000 murid, antaranya 250.000 Warga Negara Indonesia. Pada tahun 1958, sekolah-sekolah di bawah naungan Kuo-Min-Tang ditutup pada tahun 1966, semua sekolah berbahasa Tionghoa tidak diperkenankan beroperasi di Indonesia. 7)

Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa anak-anak ethnias Tionghoa tidak ada pilihan lagi, selain sekolah-sekolah berbahasa Indonesia. (Pada tahun 1968 diizinkan pendirian sekolah-sekolah yang dinamakan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPK) di beberapa kota besar, akan tetapi pada tahun 1974 sekolah-sekolah ini juga ditutup). 8)

---

7) dan 8) Lihat Moly G. Tan dan Leo Suryadinata, op.cit.

Bagaimanakah keadaan pendidikan golongan etnis Tionghoa sejak itu ? Kita melihat bahwa kebanyakan dari mereka yang sekolahnya ditutup, dapat ditampung di sekolah-sekolah swasta, yang sudah ada, atau yang didirikan oleh kelompok-kelompok swasta lainnya. Preferensi mereka rupanya adalah sekolah-sekolah yang di bawah asuhan kelompok Kristen Protestan dan Katolik. Sebab-sebabnya terletak pada keadaan sekolah-sekolah tersebut, keadaan sekolah negeri dan keadaan golongan etnis Tionghoa itu sendiri. Ada anggapan umum bahwa karena sekolah negeri masih belum cukup jumlahnya untuk menampung semua anak yang seharusnya bersekolah, anak-anak etnis Tionghoa seyogyanya ke sekolah swasta, juga karena mereka dianggap mempunyai kemampuan finansial untuk mengongkosinya. Dari pihak golongan etnis Tionghoa terdapat anggapan bahwa sekolah-sekolah swasta tersebut lebih tinggi mutunya, diukur dari keberhasilan murid dan disiplin di sekolah.

Bahwa hal ini, ialah mutu sekolah, merupakan pertimbangan yang paling menentukan, terlihat dari hasil penelitian di Sukabumi <sup>9)</sup> yang dilakukan oleh penulis dan hasil penelitian di Blora yang dilakukan oleh Hari Poerwanto <sup>10)</sup> dari Fakultas Sastra, UGM. Penelitian di Blora ini yang berjudul "Minoritas Cina di Kecamatan Kota Blora : Suatu Penelitian Mengenai Masalah Akomodasi pada Tahun 1972", memperlihatkan bahwa dari segi pendidikan, para respondennya, mengelompok di sekolah negeri, terutama pada tingkat SMA, dan sebabnya adalah karena sekolah ini memperlihatkan persentase lulusan yang paling tinggi di kota tersebut. Demikian pula gambaran yang terlihat mengenai preferensi pendidikan di kota Sukabumi, walaupun disini pilihannya adalah sekolah swasta Katolik.

---

9) Giok-Lan Tan (Mely G. Tan), The Chinese of Sukabumi : A Study in Social and Cultural Accomodation. Monograph Series, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, 1963.

10) Hari Poerwanto Soewardi, "Minoritas Cina di Kecamatan Kota Blora, Suatu Penelitian mengenai Masalah Akomodasi pada tahun 1972". Skripsi Fakultas Sastra, UGM, untuk Sarjana Ilmu Antropologi, 1973.

Untuk memperlihatkan betapa tinggi nilai terhadap pendidikan yang terdapat pada golongan ethnias Tionghoa, kami dapat melaporkan hasil penelitian kami mengenai golongan tersebut di Amerika Serikat yang menunjukkan performance mereka dalam bidang pendidikan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

MEDIO TAHUN BERSEKOLAH, TOTAL A.S., GOLONGAN JEPANG, GOLONGAN TIONGHOA,  
MENURUT JENIS KELAMIN, 1940, 1950, 1960

T a h u n	Total A.S		J e p a n g		T i o n g h o a	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1940	8,3	8,5	8,8	8,6	5,6	5,0
1950	9,0	9,6	12,2	12,2	8,4	10,3
1960	10,3	10,9	12,2	12,2	10,7	11,7

Sumber : Mely G. Tan, The Chinese in the United States, Social Mobility and Assimilation, Ph.D. Dissertation, University of California, Berkeley, 1968.

Tabel ini memperlihatkan betapa meningkatnya performance dalam pendidikan dari tahun 1940 - 1960, melebihi performance di A.S. secara umumnya walaupun masih kalah dengan performance orang Jepang.

#### KESIMPULAN

Gambaran yang kami perlihatkan di atas tentang arti pendidikan untuk golongan ethnias Tionghoa yang didasarkan atas sistem nilai sosial dan budaya yang dianut mereka, menunjukkan bahwa pertimbangan yang paling mementukan adalah mutu sekolah, bukan status negeri atau swasta, bukan jauh-dekat letaknya, bahkan bukan bahasa pengantarnya.

Dengan .....

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa jika cukup banyak sekolah negeri yang bermutu terutama pada tingkat SD dan SL, sehingga mereka juga dapat diterima di sana, anak-anak etnis Tionghoa akan mengalir kesana, tanpa pengaturan ataupun anjuran.

#### BEBERAPA SARAN

Agar diperhatikan bahwa pembauran pendidikan tidak hanya penggabungan menurut persentase tertentu di sekolah tertentu, tapi sekaligus mencakup sikap dan perilaku guru terhadap kenyataan keaneka-ragaman masyarakat Indonesia, serta isi mata pelajaran, khususnya yang bertalian dengan civics dan IPSK.

Pendidikan di rumah (sosialisasi) merupakan bagian yang integral dari pembentukan kepribadian si anak. Bagaimana sikap dan perilaku orang tua terhadap orang-orang dari golongan suku agama lainnya, sangat menentukan pembentukan sikap dan perilaku si anak mengenai hal ini. Disini termasuk peranan pemuka-pemuka masyarakat, khususnya pemuka-pemuka agama serta pranata agama dan pranata sosial lainnya dalam masyarakat. Perlu dipikirkan cara-cara bagaimana menanamkan kesadaran tentang aspek-aspek positif dari ke-Bhinekaan masyarakat kita.

Agar diadakan penelitian tentang isi pelajaran dan isi buku sekolah terutama pada tingkat SD dan SL, dan khususnya yang bertalian dengan mata pelajaran civics dan IPSK, sejauh mana pelajaran dan buku-buku itu membina dan mendukung sikap serta perilaku positif terhadap berbagai kelompok suku dan kelompok agama.

Agar diadakan penelitian yang bersifat evaluatif tentang usaha pembauran di sekolah, dan dampaknya terhadap sikap dan perilaku murid dan guru.

Jakarta, 25 Oktober 1981.

Makalah yang diberikan pada Lokakarya Nasional Pembauran Pendidikan yang diselenggarakan oleh Team Pembantu Pelaksana Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Orchid Hotel, Jakarta, 26 - 28 Oktober 1981.

Sumber: Tabel-tabel ini diambil dari Dr S.L. van der Mal, Het Onderwijsbeleid in Nederlands-Indie 1900 - 1949, Een Bronnen publikatie, Groningen : J.B. Wolters, 1963, hl. 693 - 700.

Tabel 1  
S.D. BAHASA BELANDA (EUROPESE LAGERE SCHOLEN)

Tahun	P e m e r i n t a h				S w a s t a			
	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total
1900	87,9%	10,0%	2,1%	15.462	97,3%	2,0%	0,8%	3.530
1905	77,9	19,4	2,7	19.382	91,0	4,2	4,8	4.335
1910	80,5	15,7	3,8	21.774	84,1	4,9	11,0	5.001
1915	78,8	16,8	4,4	25.002	80,5	5,3	14,2	6.558
1920	75,0	19,8	5,2	27.160	80,8	7,8	11,4	9.804
1925	77,7	16,6	5,7	26.173	86,9	5,7	7,4	14.322
1930	81,0	13,8	5,2	24.409	89,8	3,7	6,5	19.898
1935	80,1	16,0	3,8	22.828	90,3	4,9	4,8	22.205
1940	79,6	17,8	2,7	22.719	92,7	4,5	2,7	24.563

Tabel 2  
HOLLANDS-CHINESE SCHOLEN

Tahun	P e m e r i n t a h				S w a s t a			
	Tionghoa	Pribumi	Eropa	Total	Tionghoa	Pribumi	Eropa	Total
1908	100%	-	-	821	-	-	-	-
1910	98,4	1,3	0,3	2.740	-	-	-	-
1915	98,3	1,3	0,4	5.414	88,2%	11,8%	-	321
1920	97,6	1,8	0,7	7.975	87,2	8,4	4,4%	2.246
1925	97,8	1,7	0,4	10.142	91,7	6,8	1,5	5.850
1930	97,7	1,9	0,4	12.998	90,3	8,5	1,2	8.619
1935	96,9	2,5	0,6	12.806	86,7	10,8	2,4	10.050
1940	95,0	4,0	0,9	13.620	81,8	13,8	2,6	12.976

Tabel 3  
HOLLANDS-INLANDSE SCHOLEN \*)

Tahun	P e m e r i n t a h				S w a s t a			
	Pribumi	Timur Asing	Eropa	Total	Pribumi	Timur Asing	Eropa	Total
1915	99,3%	0,6%	0,1%	19.719	96,2%	3,3%	0,5%	3.015
1920	98,1	1,6	0,3	26.659	97,4	2,0	0,6	7.239
1925	97,8	1,8	0,5	36.196	96,5	2,9	0,6	21.180
1930	96,8	2,6	0,6	38.708	96,1	3,2	0,7	22.202
1935	96,8	2,3	0,8	40.926	96,9	2,4	0,7	21.114
1940	97,9	1,4	0,7	46.942	97,6	1,8	0,6	25.936

\*) Sejak tahun 1900 sudah ada apa yang dinamakan Speciale Scholen untuk Pribumi dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Tabel 4  
HOGERE BURGER SCHOLEN LIMA TAHUN

Tahun	P e m e r i n t a h				S w a s t a			
	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total
1925 *)	85,2%	6,5%	8,3%	1.882	98,1%	-	1,9%	103
1930	83,3	6,3	10,4	2.645	94,9	4,1	1,0	98
1935	70,5	13,5	16,0	3.408	86,3	4,8	8,9	146
1940	61,5	20,0	18,8	2.551	81,0	8,6	10,3	605

\*) Sudah ada sejak tahun 1900.

Tabel 5  
HOGERE BURGER SCHOLEN TIGA TAHUN

Tahun	P e m e r i n t a h				S w a s t a			
	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total
1925 <sup>*)</sup>	81,2%	4,2%	14,5%	165	92,4%	1,7%	5,8%	582
1930	63,6	8,4	28,0	143	89,4	3,6	7,0	603
1935	-	-	-	-	87,2	6	5,9	724
1940	80,0	14,0	6,0	50	86,8	7,3	5,9	711

\*) Sudah ada sejak tahun 1900.

Tabel 6  
MULO BAHASA BELANDA

Tahun	P e m e r i n t a h				S w a s t a			
	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total
1915	61,6%	30,2%	8,1%	1.043	90,7%	7,8%	1,5%	129
1920	49,4	43,0	7,7	2.634	80,4	12,8	6,8	280
1925	35,4	54,9	9,6	6.421	61,7	24,5	13,8	1.301
1930	21,4	67,1	11,5	7.845	45,2	41,6	13,2	3.943
1935	15,4	69,4	15,2	5.584	45,0	35,3	19,7	3.692
1940	12,5	71,2	16,3	8.538	39,5	37,7	22,7	5.717

Tabel 7  
ALGEMENE MIDDELBARE SCHOLEN (SEKOLAH MENENGAH UMUM)

Tahun	P e m e r i n t a h				S w a s t a			
	Pribumi	Eropa	Timur Asing	Total	Pribumi	Eropa	Timur Asing	Total
1919	52,4%	35,7%	11,9%	42	-	-	-	-
1925	60,2	28,9	10,9	256	-	-	-	-
1930	66,1	13,5	20,4	872	40,8%	26,2%	33,0%	179
1935	56,9	13,0	20,1	1.005	36,8	33,9	29,3	280
1940	69,5	13,1	17,4	1.062	38,4	37,4	24,2	479

Tabel 8  
LYCEA (SEKOLAH MENENGAH KHUSUS)

Tahun	P e m e r i n t a h				S w a s t a			
	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total	Eropa	Pribumi	Timur Asing	Total
1925	-	-	-	-	95,3%	1,2%	3,5%	85
1930	-	-	-	-	96,9	1,7	1,3	450
1935	-	-	-	-	92,7	3,7	3,7	764
1940	73,9%	10,4%	1,57%	1,616	93,9	3,5	2,5	1.075

Tabel 9  
U N I V E R S I T A S

Tahun	Tahap pertama masuk				Lulus Universitas			
	Pribumi	Tionghoa	Eropa	Total	Pribumi	Tionghoa	Eropa	Total
1920-21	7,1%	14,3%	78,6%	28	-	-	-	-
1921-22	16,2	5,4	78,4	37	-	-	-	-
1922-23	19,0	9,5	71,4	42	-	-	-	-
1923-24	27,8	16,7	55,5	18	0	25%	75%	12
1924-25	32,9	14,5	52,6	76	0	0	100	8
1925-26	35,0	18,3	46,7	60	20	10	70	20
1926-27	47,6	7,9	44,4	63	42,8	7,1	50	14
1927-28	43,2	23,9	33,0	88	37,5	-	62,5	8
1928-29	40,0	12,7	47,3	110	23,1	15,4	61,5	13
1929-30	56,2	14,8	29,0	162	31,6	5,3	63,1	19
1930-31	46,7	21,6	31,7	227	33,3	8,3	58,3	12
1931-32	43,9	19,3	36,8	212	47,1	-	52,9	17
1932-33	47,8	25,0	27,2	228	46,7	6,7	46,7	15
1933-34	47,3	24,2	28,5	256	36,4	13,6	50	22
1934-35	42,1	28,2	29,7	266	41,2	35,3	23,5	34
1935-36	44,6	27,3	28,1	231	50	10,3	39,7	58
1936-37	47,4	23,3	29,2	253	46,9	26,5	26,5	49
1937-38	54,0	27,2	18,8	287	53,5	25,4	21,1	71
1938-39	51,1	28,6	20,3	286	49,4	25,9	24,7	81
1939-40	49,4	24,5	26,1	318	46,8	29,1	24,1	79



# PEMBAURAN PENDIDIKAN MELALUI PERGURUAN TAMAN SISWA

oleh  
**Ki Soeratman**

( MBS PUSAT )

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROYEK ASIMILASI  
DIBIDANG PENDIDIKAN DAN PENGATURAN  
PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

**1981**

KI SOERATMAN :

## PENBAURAN PENDIDIKAN MELALUI PERGURUAN TAMA SISWA

Sumbangan pikiran tentang  
penbauran pendidikan ber-  
dasarkan data empirik.

### PENDAHULUAN

1. Adalah merupakan tuntutan sejarah bagi setiap bangsa, bahwa eksistensinya itu telah mengandung di dalamnya suatu keherusan untuk mampu melestarikan kehasirannya. Hal ini berkaitan dengan masalah pengembangan bangsa (nation building) dan karenanya merupakan kewajiban bangsa tersebut. Mengenai kelestarian bangsa ini tidak mungkin diserahkan pengusahaannya kepada bangsa lain. Bangsa itu sendiri harus berusaha sendiri, mewujudkannya sendiri agar bangsa itu tetap lestari sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat .

Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia, yang kehadirannya sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat, yang bersatu dan ber-Pancasila, di dalamnya juga terkandung kewajiban untuk dapat tetap lestari.

Oleh karena itu kelestarian bangsa Indonesia dan usaha pelestariannya, merupakan tugas nasional bangsa Indonesia, dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negaranya.

2. Dalam rangka pengembangan bangsa diperlukan satu konsepsi tentang bangsa Indonesia. Mengenai hal ini sebenarnya sudah cukup jelas, karena sudah sejak masa mempersiapkan kemerdekaan hingga sampai saat memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, masalah tersebut sudah selalu mendapat perhatian kita.

Serangat persatuan dan cita-cita nasional bangsa yang menghendaki masa depan yang lebih baik, telah mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia, yang sanggup mengusir penjajah dari bumi Indonesia, dan mampu menumpas kekuatan separatis yang akan memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Berbagai .....

Berbagai perubahan penggunaan UUD yang selama ini pernah terjadi di Indonesia, ternyata tidak pernah mengubah atau mengaburkan mengenai konsepsi tentang bangsa dan warganegara Indonesia tersebut. Dengan demikian ada semacam asumsi yang kuat, bahwa sebenarnya bangsa dan warganegara Indonesia sudah jelas dan gamblang, tidak pernah dikaburkan oleh siapapun sejak persiapan kemerdekaan hingga sekarang ini.

3. Mengingat jumlah penduduk kita yang cukup besar dan karenanya adalah wajar jika keadaannya sangat heterogen, maka perlu kiranya diadakan upaya-upaya untuk dapat menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, karena hanya persatuan dan kesatuan bangsa inilah syarat paling utama bagi usaha pelestarian bangsa.

Dalam usaha menginventarisasi jenis penduduk Indonesia yang ada dewasa ini, ternyata ada 4 jenis, ialah :

- (1) Warga-negara Indonesia asli
- (2) Warga-negara Indonesia keturunan Asing
- (3) Warga-negara Asing yang menetap di Indonesia
- (4) Warga-negara Asing yang tidak menetap.

Meskipun beraneka ragam kedudukan dan masa-tinggalnya, tetapi sebagai bagian dari satu totalitas bangsa Indonesia, semuanya harus dipersatukan agar dapat merupakan satu kesatuan yang homogen, dalam arti dapat bersama-sama dibawa ke arah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia, seperti telah diamanatkan rakyat melalui Pembukaan UUD 1945.

4. Sebagai bangsa yang sedang tumbuh dan berkembang dalam proses menuju ke arah kedewasaan berbangsa dan bernegara, bangsa kita banyak dihadapkan kepada berbagai persoalan yang perlu diatasi. Persoalan pembinaan kesatuan bangsa, seperti telah diuraikan di muka, merupakan salah satu persoalan yang dihadapi. Terutama mengenai masalah kewarganegaraan pada umumnya, dan masalah warga-negara Indonesia keturunan Cina khususnya.

Asumsi .....

Asumsi seperti telah disebut di muka, rupanya tidak mampu memecahkan masalah konkrit sehubungan dengan persoalan WNI keturunan Cina tersebut. Oleh karena itu kemudian dipandang perlu adanya UU yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang antara lain untuk mengatasi dan memecahkan persoalan konkrit tersebut.

#### SELINTAS MASALAH CINA DI INDONESIA DAN PERUNDANGAN YANG MENGATURNYA

1. Bagi suatu bangsa yang berdaulat sangat diperlukan adanya perundangan yang mengatur segenap penduduknya dalam hubungannya dengan hak dan kewajibannya sebagai warga-negara. UU yang mengatur kewarga-negaraan R.I. Namun perlu kiranya ditegaskan, bahwa UU tersebut lahir dalam rangka UUD Sementara tahun 1950. Oleh karena itu sehubungan dengan Dekrit Presiden RI tertanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, maka wajarlah bahwa dalam memberlakukan hukumpun juga harus dikembalikan dalam rangka UUD 1945.

2. Sehubungan dengan masalah kowarga-negaraan dalam rangka UUD 1945, pernah dibuat UU yang mengatur tentang kewarga-negaraan RI, ialah UU No. 3/1946, yang dinyatakan berlaku sejak 17 Agustus 1945, yang hingga sekarang belum pernah dicabut atau dinyatakan batal.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka sesuai pula dengan tekad Orde Baru untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sudah wajar dan bijaksana kiranya, apabila dalam memberlakukan UU No. 62/1958 dijiwai dan disemangati oleh UU No. 3/1946 tersebut.

3. UU yang mempunyai pengaruh besar terhadap masalah WNI keturunan Cina adalah UU No. 2/1958 tentang Dwi Kewarga-negaraan. Hal ini disebabkan karena mereka yang telah menjadi WNI berdasarkan UU No. 3/1946 dengan di keluarkannya UU No. 2/1958 secara aktif harus menegaskan kembali kewarga-negaraannya : atau tetap menjadi WNI atau menolak WNI.

Beskipun .....

Meskipun UU No. 2/1958 kenyataannya merupakan UU yang mempunyai pengaruh besar terhadap masalah kewarga-negaraan, namun sebenarnya UU tersebut harus diragukan validitasnya. Hal ini terutama disebabkan oleh asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa UU Kewarga-negaraan Republik Rakyat Cina mempunyai yurisdiksi terhadap orang-orang berdarah Cina di Indonesia perlu diragukan adanya.

Oleh karena itu Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto telah membuat tindakan yang sangat tepat dan bijaksana, dengan membatalkan secara sepihak UU No. 2/1958 itu dengan UU No. 4/1969.

#### PEMBAURAN ADALAH MASALAH NASIONAL

1. Melihat kenyataan mengenai jenis penduduk dan status kewarga-negaraan seperti telah diuraikan di muka, maka guna mencapai persatuan dan kesatuan bangsa, perlu diadakan langkah pembauran. Hal ini perlu dilakukan karena para WNI keturunan asing tersebut, sebagai warga-negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan WNI yang asli.

Untuk pengertian pembauran ini, dalam masyarakat dan berbagai ketentuan perundangan juga digunakan istilah assimilasi. Sudah barang tentu asimilasi ini dapat bersifat fisik dan juga bersifat mental-psikhis. Jika yang dicapai hanya asimilasi fisik atau lahiriah, maka hal ini belum mencapai sasaran, karena mungkin sekali sifatnya adalah semu belaka. Oleh karenanya maka diusahakan agar dapat tercapai asimilasi secara mental-psikhis.

2. Mengenai pengertian asimilasi itu dapat kita kutipkan dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0170/U/1975, yang bunyinya sebagai berikut :

Assimilasi (pembauran), adalah kebijaksanaan Pemerintah di bidang pendidikan untuk anak didik warga-negara Indonesia keturunan Asing dan anak didik penduduk Indonesia warga-negara Asing guna mendapatkan pendidikan yang bersifat nasional.

Warga-negara.....

Marga-negara Indonesia, termasuk juga berasal dari keturunan asing harus menghayati dan berjiwa Pancasila, dan anak didik penduduk Indonesia warga-negara asing wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka berada.

3. Adapun maksud dan tujuan asimilasi adalah :

- a. menimbulkan dan memupuk kesamaan nilai, sikap hidup dan perilaku sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, senasib seperjuangan, sebanisa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad bersama mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila.
- b. menumbuhkan perasaan sebagai anggota/bagian dari masyarakat Indonesia seutuhnya, sehingga tercipta perikehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang serta adanya keselarasan hidup yang sesuai dengan kemajuan bangsa.

4. Memperhatikan arti dan tujuan asimilasi tersebut, maka terwujudnya asimilasi menjadi kepentingan seluruh masyarakat, dan karenanya merupakan masalah nasional bangsa Indonesia.

Assimilasi bukan saja menjadi tanggung jawab dan kepentingan Pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab dan kepentingan masyarakat.

Karena yang menjadi masalah adalah sikap mental manusia dalam masyarakat, maka pelaksanaan asimilasi akan menjangkau ruang lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu adalah wajar bahwa penanganannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama.

5. Untuk mencapai tujuan asimilasi sebaik-baiknya diusahakan agar supaya dapat dicapai asimilasi dalam arti mental psikhis; karenanya diusahakan untuk ditempuh melalui jalur pendidikan.

Selubungan .....

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusahakan agar jangan terjadi perguruan yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan bagi anak-didik warga-negara Indonesia keturunan asing atau warga-negara asing. Sekolah-sekolah demikian perlu kiranya dibaurkan dalam arti dijadikan sekolah seperti umumnya, yang menerima murid dari segala lapisan dan kalangan masyarakat. Sudah tentu dalam pengaturannya harus ada ketentuan hukum yang menjadi landasannya.

#### KEBIJAKAN PEMBAURAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

1. Menentukan kebijakan asimilasi melalui jalur pendidikan adalah tepat, karena hal itu pasti akan dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus. Memang tentang asimilasi tidak mungkin dilakukan dengan tindakan yang dratis, apa lagi jika yang dikehendaki adalah asimilasi yang bersifat mental-psikhis.

Usaha untuk mempengaruhi atau mengubah sikap mental harus dilaksanakan secara bertahap, berencana dan terus menerus. Oleh karenanya melalui jalur pendidikan adalah jalan yang paling tepat. Karena jalur yang digunakan adalah pendidikan, maka yang menjadi sasaran pelaksanaan asimilasi adalah anak-didik.

Melaksanakan pembauran pendidikan ini dalam rangka melaksanakan Pendidikan Nasional, dan karena itu wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur Pendidikan Nasional tersebut.

Hal ini meliputi dasar dan tujuan pendidikan, isi pendidikan, kurikulum, metoda penyajian, perlengkapan yang diperlukan serta sistem evaluasi yang berlaku.

2. Adapun kebijakan tersebut secara hukum didasarkan atas :

- a. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHI
- b. Resolusi DPRS No. III/Pes/DPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa.
- c. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.

d. Keputusan .....

d. Keputusan Presiden RI No. 240 tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Keturunan Asing.

Sedang sebagai Pedoman Umum ialah :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/U/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Assimilasi (pembauran) di bidang Pendidikan.
- b. Keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. SP 562/BU/X/76/01; No. 0263/U/1976 tentang : Pengaturan Pelajar Indonesia di Luar Negeri.

3. Secara lebih terperinci SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/U/1975 menegaskan, bahwa sasaran asimilasi adalah anak didik agar mereka itu :

- a. memiliki sikap dan perilaku terbuka sebagai perwujudan penghayatan nilai-nilai Pancasila.
- b. memiliki cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan nasional, sehingga dengan demikian melenyapkan kantong-kantong kebudayaan asing.
- c. mengadakan komunikasi sosial yang saling mengisi dengan warga-negara Indonesia lainnya sehingga menghilangkan sikap eksklusivisme .
- d. menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah, sebagai bahasa Nasional.
- e. memiliki kepercayaan terhadap Tuhan YME, sehingga perikehidupan beragama dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan Falsafah Pancasila demi tercapainya kerukunan hidup beragama.
- f. berjiwa Pancasila sehingga dapat menjadi generasi penerus yang lebih baik, bertanggung jawab, lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa.
- g. memiliki kesadaran akan nilai-nilai sejarah perjuangan nasional dengan kemandirian keseimbangan kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong-royong sehingga sanggup mampu melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan.

4. Untuk .....



4. Untuk mewujudkan usaha asimilasi tersebut Pemerintah telah menentukan sejumlah sekolah, meliputi sekolah negeri dan perguruan swasta. Sudah barang tentu yang dibaurkan dalam sekolah-sekolah tersebut adalah para murid dari bekas sekolah-sekolah Cina, yang dahulu merupakan sekolah yang eksklusif, dengan kurikulum tersendiri, yang jelas masih mengutamakan kebudayaan leluhur mereka, sehingga bersikap tertutup terhadap kebudayaan nasional Indonesia.

Perguruan swasta yang turut bertugas melaksanakan asimilasi di bidang pendidikan ini ada yang berdasarkan pendidikan agama tertentu, dan ada pula yang berorientasi nasional. Tetapi bagaimanapun, perguruan swasta tersebut tetap diberi kebebasan untuk tetap mewujudkan ciri khasnya yang menjadi identitas masing-masing perguruan.

Salah satu perguruan swasta yang ditugaskan untuk turut mewujudkan asimilasi tersebut adalah Perguruan Tamansiswa yang sistem pendidikannya dikenal sebagai Sistem Among atau Tutwuri Handayani.

#### SELAYANG PANDANG TENTANG PERGURUAN TAMANSISWA

1. Sehubungan dengan tugas mewujudkan asimilasi dibidang pendidikan tersebut, perlu kiranya secara sepintas lalu diberikan beberapa informasi mengenai Perguruan Tamansiswa tersebut.

Adapun pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Perguruan Tamansiswa, sesuai dengan asasnya, terbuka bagi setiap murid tanpa pandang bulu (non-diskriminatif).
- b. Anak-didik diberi pendidikan berdasarkan kurikulum Pemerintah ditambah Ketamansiswaan, yang pada hakekatnya merupakan pendidikan moral dan budi pekerti dalam rangka pendidikan watak (character building)
- c. Dari segi administratif, maka setiap murid membayar sejumlah dana pendidikan yang sama (rata-rata, tanpa kategori).

d. Sistem .....

- d. Sistem Among menempatkan anak didik sebagai subyek dan obyek sekaligus, sehingga terjadi proses belajar mengajar yang demokratis.
- e. Tujuan pendidikannya adalah menjadikan anak-didik manusia yang berjiwa merdeka, bersemangat kebangsaan, berkesanggupan membudayakan diri dan lingkungannya, cerdas dan trampil, berbudi luhur, kesemuanya itu dalam kesadarannya sebagai umat ciptaan Tuhan YME, yang wajib bertaqwa dan menyembah kepada penciptanya.

2. Sebagai organisasi Tamansiswa bercita-cita untuk mencapai masyarakat yang tertib damai. Oleh karena itu sifat manusiawi dan sikap demokratis sangat dijunjung tinggi. Sedang secara keseluruhan Tamansiswa berorientasi : nasional, kultural dan sosial (national, cultureel, maatschap-peljik).

#### PELAKSANAAN PEMBAURAN PENDIDIKAN DI TAMANSISWA

1. Perguruan Tamansiswa yang tersebar di berbagai pelosok tanah air tidak semuanya melaksanakan atau ditugaskan untuk melaksanakan asimilasi. Waktu ini beberapa cabang Tamansiswa di daerah Sumatera yang menyelenggarakan pembauran pendidikan.

Sebagai contoh akan diambil dua cabang perguruan Tamansiswa, satu dari Sumatera Utara, ialah Tamansiswa Pematangsiantar dan yang satu lagi dari Sumatera Selatan, ialah Tamansiswa Palembang.

Diambilnya dua cabang ini karena keduanya banyak mempunyai murid Cina, tetapi sebenarnya mempunyai alasan-alasan yang berbeda. Oleh karena itu baik dikemukakan sebagai percontohan.

2. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, dalam arti bahwa perguruan Tamansiswa dalam penerimaan muridnya tidak pandang bulu, maka mengenai masalah asimilasi sebenarnya tidak pernah menjadi perhatian Tamansiswa secara khusus.

Berdasarkan .....

Berdasarkan prinsip itu, maka adalah hal yang wajar bilamana di suatu cabang ada yang memiliki murid keturunan Cina, pada masyarakat yang memang terdapat warga masyarakatnya yang keturunan Cina. Bahkan Tamansiswa cabang Jakarta, memiliki murid-murid keturunan Cina, India, Arab, Pakistan dan sebagainya.

3. A. Tamansiswa Pematangsiantar ini termasuk perguruan yang sudah sejak jaman kolonial Belanda dahulu sudah dikunjungi murid keturunan Cina. Oleh karenanya kehadiran murid keturunan Cina dalam jumlah yang besarnya tidak merupakan kejutan dan tidak perlu mengambil kebijaksanaan yang khusus. Kejadian semacam itu sudah merupakan hal yang biasa saja. Bahkan melayani anak didik keturunan Cina itu sudah merupakan tradisi yang membudaya.

B. Tamansiswa Palembang, memang sejak lama juga mempunyai murid keturunan Cina, tetapi jumlahnya sangat kecil dibanding dengan murid-murid Indonesia. Dengan keadaan demikian kehadiran mereka itu tidak pernah diperhitungkan.

Setelah Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk melaksanakan asimilasi melalui pendidikan, maka Tamansiswa Palembang turut menerima tugas melaksanakan pembeuran tersebut. Dewasa ini kehadiran murid keturunan Cina ini sangat besar jumlahnya dan karenanya sangat menyolok. Untuk itu perguruan wajib mengambil langkah khusus untuk dapat melaksanakan tugas asimilasi itu dengan baik.

4. Meskipun kedua perguruan Tamansiswa di atas alasan penerimaan murid keturunan Cina itu berbeda, namun dalam pelayanan terhadap mereka itu, kedua cabang itu sama, yang dapat diutarakan sebagai berikut :

- a. Pola dasarnya adalah perlakuan yang sama (non-diskriminatif) antara anak keturunan Cina dan anak Indonesia.
- b. Pendekatannya manusiawi.
- c. Anak keturunan Cina tidak dikucilkan dan tidak dimanjakan.
- d. Diberi .....

- d. Diberi kesempatan yang sama dalam kehidupan di lingkungan perguruan (menjadi ketua kelas, ketua OSIS, kepala regu Pramuka, pemimpin upacara, pembaca naskah proklamasi/ Pancasila waktu upacara).
  - e. Pengaturan di dalam tiap kelas jumlah anak Indonesia harus lebih banyak daripada anak keturunan Cina. Tujuannya adalah untuk menghilangkan perasaan dominan dalam masyarakat kelas.
  - f. Kepada anak keturunan Cina ditimbulkan kesadarannya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan perguruan, dan dilarang menggunakan bahasa Cina meskipun dalam percakapan antar mereka sendiri.
  - g. Karena pungutan dana pendidikan (uang sekolah dan lain-lain) adalah sama, maka tidak ada perasaan lebih terhadap yang lain.
  - h. Dalam pendidikan ditrapkan kurikulum 1975 ditambah ketamansiswaan, jadi tidak ada mata pelajaran yang secara khusus diperuntukkan sejumlah murid tertentu. Semua murid diperlakukan seperti murid Tamansiswa tanpa pembedaan.
4. Faktor yang menghambat berupa :
- a. Perasaan kurang aman, dikucilkan dan sebagainya dari pihak non pribumi.
  - b. Perasaan sentimen terhadap non pribumi oleh pihak pribumi, melihat kenyataan bahwa pihak non pribumi rata-rata ekonomis kuat.
  - c. Sementara pamong yang bersikap masa-bodoh terhadap tugasnya.
  - d. Jika terjadi peristiwa sosial yang menyangkut Cina.
- Faktor yang menunjang berupa :
- a. Suasana kekeluargaan dalam perguruan
  - b. Perlakuan .....

- b. Perlakuan sama dan pemberian kesempatan sama
- c. Berkat Sistem Among (tutwuri handayani)
- d. Perasaan aman dan "diuwongake" (diperlakukan manusiawi)

KUNCI UTAMA : PERLAKUAN TERHADAP SETIAP ANAK SEBAGAI MURID  
TAMANSISWA.

1. Perlakuan sama terhadap setiap murid meliputi bidang :
  - a. Edukatif :
    - perlakuan sama
    - kesempatan sama
    - non-diskriminatif
  - b. Administratif :
    - dana pendidikan sama
    - iuran PPTS/OSIS
    - langganan majalah SISWA

Perlakuan sama di segala bidang menimbulkan perasaan kebersamaan yang memudahkan menimbulkan :

- rasa handarbeni (perguruan Tamansiswa milik kita bersama)
- rasa tanggung jawab (menjunjung tinggi nama perguruan)

Jadikan mereka itu bangga menjadi "murid Tamansiswa" sebagai jembatan untuk bangga sebagai Pemuda Indonesia dan sebagai Bangsa Indonesia.

3. Setiap manusia di dunia selalu ingin merasa aman. Demikian juga para murid yang berada dalam proses berassimilasi tersebut. Jika mereka merasa dikucilkan, merasa tersudut, sudah pasti mereka akan mengadakan suatu pertahanan atau pembelaan diri (defence mechanism) dengan cara berkelompok, eksklusif, demonstratif dan sebagainya. Hal ini adalah wajar juga karena menyangkut mengenai masalah "survival" (kelestarian/harga dirinya).

Kemungkinan .....

Kemungkinan seperti terlukiskan itu hendaknya dihindari, agar supaya terdapat harmoni dalam kehidupan bersama, sehingga dapat diciptakan suasana yang tertib dan damai.

Sebaliknya jika hal itu tidak berhasil diusahakan, maka akan timbul disharmoni dalam masyarakat, dengan akibatnya gagalnya usaha asimilasi.

4. Kita semua berkeinginan agar supaya proses asimilasi itu akan mencapai segi mental-psikhis, karena hal yang demikian itu yang lebih mendasar. Oleh karena itu mengenai sikap mental, berarti usaha mempengaruhi mental seseorang, maka jalannya mesti bertahap dan akan makan waktu yang lama.

5. Tentang kecepatan membaur diri itu juga akan sangat ditentukan oleh kadar "Kecinannya", karena hal tersebut memang berbeda-beda antara satu tempat dan tempat yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa kondisi Cina di Medan, Bagan Siapi-api, Pakanbaru, mungkin berbeda dengan Cina di Palembang, Lampung, Jakarta dan beberapa daerah di Jawa.

Jadi jika diantara mereka itu terdapat yang cepat berassimilasi, kemudian ada yang agak lama bahkan sulit sekali berassimilasi, sebab pokoknya tiada lain adalah kadar "Kecinannya" dalam arti kultural. Mereka itu termasuk golongan yang masih sangat erat terikat dengan kebudayaan leluhurnya, yang oleh karenanya agak sulit diberi arah baru dalam mengembangkan dirinya dalam suasana Indonesia baru dengan falsafah Pancasila.

#### KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. Untuk mengakhiri uraian ini perlu kiranya disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Untuk .....

- a. Untuk kepentingan kelestarian bangsa Indonesia, agar tetap sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan ber-pancasila, maka perlu diselenggarakan usaha asimilasi melalui pendidikan.
  - b. WNI keturunan Cina pada hakekatnya merupakan potensi nasional yang cukup penting. Oleh karenanya mereka perlu diberi senjata yang berwujud sikap mental yang tangguh Pancasilais dan berorientasi nasional Indonesia, agar supaya mereka itu dapat dimanfaatkan bagi ketahanan nasional Indonesia.
  - c. Dalam proses asimilasi perlu dilakukan pendekatan dengan perlakuan yang sama dan sifatnya manusiawi.
  - d. Berikan kesempatan yang sama dalam melakukan berbagai kegiatan dalam perguruan, sehingga berdasarkan prestasi masing-masing semua berkesempatan menjadi "pemimpin" dalam masyarakat perguruannya.
  - e. Hindarkanlah dari kegiatan yang dapat menimbulkan faktor yang memecah-belah dan kembangkanlah justru faktor-faktor yang integratif.
2. Uraian tentang pengalaman perguruan Tamansiswa dalam melaksanakan pembauran pendidikan ini, semoga dapat dijadikan bahan banding bagi setiap usaha yang menghendaki berhasilnya usaha asimilasi di bidang pendidikan. Semoga.

Jogyakarta, 17 Oktober 1981.

**BHINEKA TUNGGAL IKA  
POTENSI DAN KETERBATASAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
DALAM PROSES PEMBAURAN**

( Simbiosis Pembauran melalui Pendidikan, Dep. Pendidikan )

oleh :

**Toenggoel P. Siagian M. S. ; M.Ed.**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK ASIMILASI  
DIBIDANG PENDIDIKAN DAN PENGANTARAN  
PENDIDIKAN AGUNG DI INDONESIA

**1981**



Pendapat dan pandangan makalah ini  
adalah pendapat dan pandangan pribadi  
penulis dan tidaklah merupakan posisi  
resmi dari Musyawarah Perguruan Swasta.

## I. PENDAHULUAN.

Persoalan Umum. Masyarakat Indonesia terdiri dari manusia-manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini bisa berdasarkan suku, tingkat ekonomi, tempat permukiman, pendidikan, agama, budaya, ciri-ciri fisik dan banyak ciri-ciri lainnya. Di atas perbedaan-perbedaan ini ada pula perbedaan yang di dasarkan atas hukum: warga negara Indonesia dan warga negara Asing. Pada umumnya kebanyakan negara yang besar memang menunjukkan heterogenitas seperti ini: jarang ada negara yang mempunyai susunan penduduk yang sangat homogeen seperti Jepang atau negara-negara Skandinavia.

Selama ada suatu peraturan permainan yang jelas dan diterima oleh semua golongan maka keaneka ragaman ini tidak menimbulkan banyak persoalan. Jika peraturan sosial ini tidak membudaya maka konflik di antara golongan-golongan ini mudah timbul.

Pada umumnya, bagi penduduk pribumi, garis-garis pemisah di Indonesia tidaklah bersifat convergent, garis pemisah yang satu memperkuat garis pemisah yang lain, melainkan divergent, garis pemisah yang satu memperlunak atau menghilangkan makna dari garis pemisah yang lain. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang Indonesia secara sekaligus menjadi anggota dari beberapa kelompok.

Umpamanya ada orang Batak, Kristen dan miskin ada juga orang Batak, Islam dan kaya atau orang Jawa, Kristen dan kaya. Antara dua orang Indonesia yang diambil secara random, secara sembarangan, bisa saja didapat suatu dasar kesamaan.

Hal ini tidaklah selalu benar bagi golongan keturunan Tionghoa.

Dalam banyak hal garis-garis pemisah ini bersifat convergent bagi sebagian dari golongan Tionghoa, dengan perkataan lain biarpun ada perbedaan antara orang Bali dan orang Aceh maka lebih banyak lagi perbedaan antara orang Bali dengan orang keturunan orang Tionghoa atau antara orang-orang Aceh dan orang keturunan Tionghoa. (Perbedaan ini bisa benar-benar ada atau hanya dianggap ada oleh yang bersangkutan).

Gambaran ini dapat lebih dipertajam lagi dengan mencatatkan walaupun seseorang Indonesia dalam salah satu atau lain aspek termasuk golongan minoritas maka dalam aspek lain ia termasuk golongan mayoritas sedangkan kebanyakan orang keturunan Tionghoa hampir selalu termasuk golongan minoritas dalam aspek-aspek yang sama.

yang menjadi persoalan disini ialah apakah mungkin kita menjalin sesuatu perangkat sehingga saudara-saudara keturunan Tionghoa tidak selalu berada dalam pihak minoritas tetapi dalam beberapa hal termasuk golongan mayoritas. Oleh jua dikatakan bagaimanakah kita dapat membuat kedudukan keturunan Tionghoa sedikit banyak sama saja dengan kedudukan orang Indonesia lainnya. Jadi pembauran disini diartikan sebagai integrasi kedalam kehidupan masyarakat umum Indonesia tanpa perlu menghilangkan semua ciri-ciri khas golongan keturunan Tionghoa. Jelas jua disini bahwa yang terutama kita pikirkan dalam membicarakan persoalan pembauran ialah hubungan sosial antara orang Indonesia asli dan orang Indonesia keturunan Tionghoa.

Persoalan kedua yang hendak dibicarakan oleh makalah ini ialah seberapa jauh sistim pendidikan Indonesia dapat mempengaruhi proses pembauran ini dan hambatan-hambatan apakah yang terdapat?.

Sifat umum dari prasangka (prejudice) dan diskriminasi.

Sebelum kita membicarakan persoalan pembauran di Indonesia, perlu juga kita melihat hambatan-hambatan yang ada secara umum agar kita dapat mengerti mengapa pembauran pada hakekatnya, merupakan suatu proses sosial yang sangat lambat. Salah satu penghambat pembauran dimana saja di bumi ini ialah persoalan prasangka.

Dalam makalah ini prasangka atau prejudice diartikan sebagai suatu cara penglihatan atau penilaian terhadap seseorang yang didasarkan atas suatu kaidah yang terbatas sekali. Umpamanya : karena si X berasal dari suku Y maka dengan sendirinya si X mempunyai tendensi kleptomani. Karena si X dari suku Y maka dengan sendirinya si X itu orang jujur, dan sebagainya. Diskriminasi di sini diartikan sebagai perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan atas kaidah-kaidah yang berbeda dari yang dipakai bagi kebanyakan anggota masyarakat. Umpamanya seorang wanita otomatis mendapat gaji yang lebih rendah dari seorang pria walaupun pekerjaan mereka sama. Mereka dari keturunan X harus mendapat angka 10 tetapi dari golongan Y cukup mendapat angka 7 untuk diterima di Universitas. Pembesar langsung masuk dari pintu VIP, rakyat biasa antri dari pintu belakang. Jelas bahwa baik prejudice maupun diskriminasi bisa bersifat menguntungkan atau merugikan seseorang tetapi ia selalu merupakan suatu deviasi dari norma umum.

Prasangka yang menimbulkan diskriminasi mempunyai akar dalam bermacam hal. Arnold M. Rose berpendapat prejudice mempunyai akar dalam :

konflik kekuasaan termasuk kekuasaan atau sumber-sumber yang terbatas.

konflik ideologi/agama  
rasialisme  
struktur masyarakat  
psikologi/watak perorangan.

"Konflik kekuasaan boleh didefinisikan sebagai suatu pertarungan mengenai sumber-sumber yang terbatas.

Sumber-sumber ini bisa bersifat ekonomis dalam hal mana kelompok yang satu berusaha untuk mendominasi kelompok yang lain dengan maksud untuk mengambil alih kekayaan ataupun tenaga yang lain dengan harga dibawah harga yang wajar..... Nilai-nilai yang dipertengkarkan ialah prestise, lambang-lambang kehormatan, serta hak-hak seksual."

"Konflik ideologis boleh diartikan sebagai suatu pertarungan bagi kemenangan ataupun kelangsungan suatu cara hidup atau suatu sistim kepercayaan. Dalam suatu konflik ideologis, dua kelompok mempunyai nilai-nilai bertentangan dan setiap kelompok percaya bahwa nilainya yang benar malah merupakan nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Konflik rasial didasarkan atas (pertahanan) kemurnian biologis dan pemisahan kasta ..... Tujuan dari konflik ialah pemisahan secara fisik dan mutlak..... Suatu minoritas yang tidak dominan bisa saja mempunyai motif rasialis dan memulai konflik. Minoritas seperti ini biasanya memisahkan diri untuk mempertahankan kemurnian biologis mereka dan konflik terjadi bila kelompok-kelompok yang lain mencanggar bahwa kegiatan-kegiatan pemisahan diri dari kelompok ini mulai mengganggu fungsi-fungsi kelangsungan masyarakat."

"Beberapa faktor struktur masyarakat kelihatannya mempunyai pertalian dengan prasangka dan diskriminasi terhadap golongan minoritas.

Kerajaan-kerajaan yang absolut pada umumnya menghasilkan diskriminasi dan eksploitasi yang paling kejam terhadap golongan minoritas. Rupanya, kekerasan terhadap kaum minoritas ada hubungannya dengan ekonomi feodal, rasa hormat yang rendah terhadap hukum, dan suatu sistem kelas yang jelas. Prasangka dan diskriminasi yang merupakan suatu tradisi kebudayaan walaupun bukan merupakan sebab yang berdiri sendiri, meneruskan pola kekerasan terhadap kaum minoritas walaupun alasan-alasan yang menimbulkan prasangka dan diskriminasi tadi sudah tidak ada lagi ..... Propaganda yang disengaja juga dapat menimbulkan ataupun memperkuat antagonisme terhadap golongan minoritas."

"Aliran Neo-Behaviorist condong untuk menerangkan prasangka berdasarkan teori frustrasi-agresi. Banyak penyelidikan telah membuktikan bahwa jika orang dicegah untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai, ia sering bereaksi dengan memukul/membanting suatu benda atau dengan menimbulkan kejengkelan orang lain.

Dengan demikian frustrasi menimbulkan agresi. Jika seseorang tidak dapat membalas terhadap pihak yang membuatnya kurang senang maka ia akan mencari sasaran pengganti. Jika sekelompok orang atau suatu negara merasa frustrasi maka sasaran pengganti ini haruslah bersifat gampang diperoleh tetapi juga bersifat kurang berdaya untuk mempertahankan diri. Frustrasi bisa menerangkan tenaga yang mendorong prasangka tetapi tidak dapat menerangkan pilihan sasaran pengganti tadi." (1)

Mekanisme pertahanan suatu kelompok. Tanpa memusingkan apa sebab akibat dari agresi terhadap sesuatu golongan ataupun sebab akibat mengapa sesuatu kelompok merasa tertekan kita bisa juga melihat cara-cara pertahanan kelompok tadi.

Homans mengatakan bahwa : makin bertambah agresi dari luar ataupun makin kuat anggapan suatu kelompok bahwa ia ditekan (walaupun secara empiris agresi ini tidak ada) maka makin kuat pula rasa solidaritas dalam kelompok. (2)

Tidak ada data yang cukup untuk mengatakan sebaliknya yakni bahwa dengan berkurangnya tekanan atau prasangka tekanan dari luar maka solidaritas kelompok akan berkurang. Yang dapat dibuktikan ialah bahwa dengan berkurangnya tekanan atau anggapan tekanan dari luar sesuatu kelompok akan lebih mau untuk memperluas jaringan hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Baru pada taraf kedua akan kelihatan bahwa kohesi dari kelompok kecil itu menurun karena ada transfer loyalitas kepada masyarakat yang lebih luas. Pada taraf inipun ciri-ciri pokok dari kelompok tadi tidak akan selalu disisihkan oleh ciri-ciri masyarakat sekitarnya tetapi mungkin terjadi peminjaman kaidah-kaidah budaya secara bolak balik.

Homans berpendapat pula bahwa makin banyak kontak antara sejumlah manusia maka makin besar kemungkinan timbulnya perasaan positif diantara mereka. Pada pihak lain Homans melupakan bahwa dalam hal-hal tertentu bertambahnya kontak bisa saja menambah atau memperkuat perasaan negatif. Dengan perkataan lain pertambahan kontak saja tidak banyak artinya bagi penurunan ataupun kenaikan rasa solidaritas kelompok.

Dalam hubungan ini perlu juga ditanyakan mengapa suatu kelompok minoritas bisa bertahan tanpa dihisap samasekali kedalam masyarakat yang lebih luas ataupun disapu habis. Jawabannya sederhana sekali: selama suatu golongan minoritas mempunyai fungsi dalam masyarakat maka ia terus akan dapat bertahan dengan identitas kelompoknya malah masyarakat luas justru tidak akan memperbolehkan golongan minoritas tadi meleburkan diri kedalam masyarakat yang lebih luas atau membiarkannya lenyap.

Kerapkali suatu golongan minoritas tadi meleburkan diri ke dalam masyarakat yang lebih luas, mempunyai fungsi-fungsi yang sangat diperlukan. Fungsi ini bisa berupa pelaksana pekerjaan yang dianggap nista (tukang sampah, penyamak kulit, pekerja kasar, penggali kuburan), berbahaya (prajurit, pekerja tambang) membosankan (kerani, juru rawat, jaga malam) ataupun pekerjaan tersebut tidak mungkin dapat dikerjakan oleh suatu kelompok dari masyarakat yang lebih luas : fungsi perantara antara golongan rendah dan golongan elite dalam suatu masyarakat.

Pendekatan Umum. Susahnya membicarakan persoalan hubungan minoritas-mayoritas ataupun persoalan pembauran terutama disebabkan karena ilmu sosial belum sanggup membentuk suatu teori yang tuntas mengenai persoalan ini. Baru akhir-akhir ini sosiolog dan antropolog mulai mempelajari persoalan itu, dengan dipelopori oleh sarjana-sarjana Amerika. Generasi demi generasi, orang Amerika Serikat baik golongan cendekiawannya maupun masyarakat awam, percaya pada suatu "melting pot teori", percaya bahwa Amerika merupakan suatu kawah dimana manusia dari seluruh penjuru bumi ini digodok lebur menjadi satu bangsa Amerika. Huru-hara rasial tahun enam puluhan, demonstrasi-demonstrasi golongan minoritas, serta pada umumnya timbulnya rasa kebanggaan etnis ataupun rasial ("Black is Beautiful, Chicano Power, dsb.) dalam tahun tujuh puluhan membuktikan bahwa teori melting pot ini tidak mempunyai landasan empiris sama sekali tetapi hanyalah merupakan suatu slogan nasional yang sekarang sudah dikesampingkan. Malah sekarang yang dimajukan secara resmi ialah kebanggaan terhadap latar belakang kebudayaan negara leluhur dan program-program yang menopang kebanggaan ini justru mendapat subsidi dari pemerintah federal.



Baru sesudah teori melting pot dikesampingkan timbul pendekatan-pendekatan yang lebih produktif.

Alasan utama mengapa melting pot teori ini tidak jalan ialah karena dalam teori ini ke-Bhinneka-an bukan saja dikesampingkan oleh ke-Tunggal-an tetapi malah ke-Tunggal-an itu disalah tafsirkan sebagai kesamaan. Pada akhirnya kesamaan, uniformita, menghilangkan identitas serta juga kepribadian seseorang. Suatu mass society, dimana manusia-manusia dibentuk berdasarkan kesamaan nilai, kesamaan rasa, kesamaan cara hidup, kesamaan pandangan hidup, kesamaan cara berpakaian dan kesamaan lainnya yang mematikan segala perbedaan yang bisa menambah semarak hidup, bukanlah merupakan suatu masyarakat yang aman, tenteram dan produktif.

Makalah ini berpegang pada landasan bahwa dalam Bhinneka Tunggal Ika perbedaan latar belakang suku, agama, kelas, malah perbedaan apa saja dihormati tetapi ciri-ciri yang berbeda ini tetap merupakan ciri-ciri dari satu kesatuan yang lebih besar. Makalah ini juga mengambil sikap bahwa di dalam negara kita ini hanya ada satu macam warga negara Indonesia saja yang semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jelas, bahwa posisi makalah ini bukanlah merupakan suatu posisi ilmiah yang netral tetapi juga sangat diwarnai oleh pandangan hidup sipenulis sendiri. Namun demikian, dalam penjabarannya makalah ini akan tetap mencoba untuk bergerak di atas landasan teoritis yang netral.

Gagasan teoritis. Di bawah akan kami ajukan beberapa gagasan teoritis sekedar sebagai perangan saja. Kiranya waktu dan forum ini tidaklah membenarkan suatu usaha untuk mempertahankan apakah gagasan-gagasan ini mungkin diterima atau tidak mungkin diterima.

Hipotesa kerja bukanlah merupakan suatu gagasan yang orisinal melainkan merupakan pelebaran dari beberapa hipotesa yang telah umum dikenal.

- I.A. Bertambah banyak alternatif yang dapat dilihat oleh anggota-anggota masyarakat, bertambah pula kerelaan untuk mengubah tujuan yang satu dengan yang lain.
  - B. Bertambah kurang alternatif yang dilihat oleh anggota masyarakat, bertambah kuat ia berpegang pada konsepsi tujuan tunggal.
  - C. Bertambah sukar mencapai tujuan tunggal ini, bertambah pula frustrasinya.
  - D. Bertambah tinggi kadar frustrasi, bertambah pula keperluan untuk bereaksi terhadap penghalang tujuannya.
  - E. Bertambah sukar untuk bereaksi terhadap pihak penghalang (atau yang dianggap sebagai pihak penghalang), bertambah pula keinginan untuk mencari sasaran pengganti.
  - F. Bertambah kecil kemungkinan berkembang yang dilihat, bertambah pula salah satu golongan minoritas akan dianggap sebagai saingan.
- II.A. Bertambah besar persepsi saingan atau serangan, bertambah besar pula kebutuhan akan isolasi (= untuk memperbesar perbedaan dan memperkecil kesamaan).
  - B. Bertambah besar tekanan atau persepsi tekanan dari luar, bertambah besar pula solidaritas golongan.
  - C. Bertambah besar solidaritas intra golongan, bertambah seras laju pembauran.

III. .. Bertambah besar persaincan dalam masyarakat bertambah serat laju pembauran.

## II. Kedudukan orang Tionghoa di Indonesia.

Masalah Pendefinisian. Sebenarnya tidaklah mudah untuk mengatakan siapa yang merupakan orang Tionghoa di Indonesia kecuali kalau yang kita maksud ialah orang-orang Tionghoa yang mempunyai kewarga Republik Rakyat atau Taiwan. Kalau kita mau membicarakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa maka pendefinisian kita tidaklah begitu mudah. (3)

Diantara warga negara Indonesia keturunan Tionghoa terdapat suatu gradasi asimilasi yang agak luas. Ada yang sudah menghayati kebudayaan daerah malah merupakan tokoh produktif dari kebudayaan tersebut sehingga kecuali tampak fisik mereka, sukarlah kita menyebut mereka dengan ucapan lain kecuali orang Indonesia.

Pada pola lain dari kesinambungan ini kita jumpai mereka yang berorientasi budaya Tionghoa dan sebenarnya merupakan elemen asing dalam masyarakat kita kecuali bahwa mereka juga memegang paspor Indonesia.

Jelas saja bahwa klasifikasi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia sebagai Peranakan Tionghoa, bagi mereka yang telah jauh berasimilasi dengan kebudayaan setempat, dan Tionghoa Totok, bagi mereka yang berorientasi pada pola budaya Tionghoa, tidaklah banyak membantu kita. Terminologi Asli/Tidak Asli dan Pri/Non Pri juga tidak merupakan alat analisa yang banyak gunanya. Menurut Skinner, seseorang adalah seorang Tionghoa jika ia mengidentifikasi dirinya sebagai orang Tionghoa (4).

Pada hakekatnya, seseorang adalah seorang non-pri hanya karena masyarakat mencapnya sebagai non-pri. Pada akhirnya, rupanya seseorang dianggap sebagai WNI keturunan Asing hanyalah berdasarkan ciri-ciri fisik saja, suatu kategori yang sebetulnya tidak mempunyai dasar dalam filsafah kenegaraan kita.

Dengan kaburnya konsepsi kita mengenai siapa yang sebetulnya dianggap sebagai orang Tionghoa maka kabur pulalah tujuan kita untuk mencapai pembauran. Bagaimana kita dapat membentuk suatu gagasan rencana pembauran kalau tidak jelas siapa yang merupakan kelompok sasaran ? dan apa pula yang merupakan tujuan pembauran.

Stereotype. Kalau pendefinisian orang Tionghoa berdasarkan kadar asimilasinya agak kabur maka dalam mata masyarakat gambaran stereotype ataupun karikatur orang-orang keturunan Tionghoa jelas :

Orang Tionghoa semuanya pedagang, mereka mata duitan dan akan mementingkan uang di atas segala-galanya. Orang Tionghoa pada umumnya kaya.

Orang Tionghoa oportunis. Mereka akan bungkuk kemana angin bertiup.

Orang Tionghoa menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, mereka menganggap rendah semua orang pribumi walaupun mereka sering pura-pura hormat.

Orang Tionghoa selalu mau menyogok orang karena mereka kira uang adalah segala-galanya. Sebenarnya orang Tionghoalah yang membuat banyak pejabat menjadi koruptor.

Orang Tionghoa jorok.

Orang Tionghoa tidak mau bergaul dengan orang pribumi.

mereka tidak mau datang ke rumah pribumi kecuali kalau ada maksud-maksud datang.

Orang Tionghoa bekerja terlalu keras dan selalu ingin menang dalam persaingan. Mereka tidak mau membantu yang bukan Tionghoa karena mereka beruang tentu saja mereka saja yang maju di sekolah.

Orang Tionghoa tidak mau kawin dengan anak pribumi.

Orang Tionghoa hanya pura-pura saja masuk Islam atau masuk Kristen.

Jangan disangka bahwa orang-orang Tionghoa tidak mempunyai stereotype ataupun karikatur mengenai orang pribumi:

Orang pribumi mudah disocok. Orang pribumi mau uang tanpa kerja. Orang pribumi selalu memakai jabatannya untuk memeras orang Tionghoa.

Orang pribumi malas. Orang pribumi kerjanya tidak teratur.

Orang pribumi tidak bisa dan tidak mau menepati janji.

Orang pribumi jorok.

Orang pribumi tidak keruan hidup keluarganya dan tidak merupakan partner perkawinan yang bisa diandalkan.

Stereotype seperti di atas tidak ada akhirnya, kedua belah pihak percaya akan kebenaran stereotype ini tanpa mau memeriksanya secara empiris.

Memang, fungsi stereotype ialah untuk memberi gambaran yang negatif; sedangkan suatu hal yang positif saja (umpamanya kerja keras itu) bisa diberi nada negatif. (5)

Stereotype tidak usah didukung oleh kenyataan malah sering kali stereotype bertentangan dengan kenyataan empiris tetapi masih tetap kepercayaan orang.

Stereotype juga tidak bisa diperangi dengan fakta karena sumber stereotype sebenarnya bukanlah pandangan yang rasional tetapi yang emosional.

Pada hakekatnya, yang menjadi penghalang terbesar dalam suatu proses pembauran ialah justru stereotype seperti ini.

Memang merupakan kenyataan bahwa orang Tionghoa bergerak di bidang perdagangan. tetapi bolehlah disangsikan bahwa kebanyakan orang Tionghoa merupakan pedagang. Banyak orang yang lupa bahwa kebanyakan orang Tionghoa terdiri dari buruh perkebunan, petani, pedagang kecil dan nelayan. Hanya saja, bagian yang paling menyolok dari masyarakat Tionghoa memanglah terdiri dari kelompok pedagang di kota-kota.

Pada umumnya memang tidak kelihatan kebutuhan dari pihak pri ataupun non pri untuk saling mendalami budaya masing-masing kelompok. Memang benar bahwa sesuatu yang tidak dikenal tidak akan dikasihi malah dalam hubungan antar golongan seringkali terdapat suasana isolasionisme di mana orang-orang sengaja tidak mau saling kenal.

Dilemma kita dalam persoalan pembauran justru terletak pada kenyataan bahwa kedua belah pihak memang tidak mau atau tidak menganggap perlu untuk saling berkenalan.

Kesadaran berbangsa. Salah satu kritik yang dilontarkan terhadap golongan Tionghoa ialah bahwa kesadaran berbangsa mereka rendah sendiri. Golongan Tionghoa hanya mau enaknya saja. Sepintas lalu tuduhan ini memang ada benarnya, tetapi persoalan inipun tidaklah merupakan suatu persoalan yang mudah dianalisa.

Pada umumnya memang benar bahwa makin positif perasaan A terhadap B maka makin positif pula perasaan B terhadap A. "Sense of belonging" memang merupakan suatu jalan dua arah.

Dalam kebanyakan hal sebenarnya golongan muda Tionghoa tidaklah banyak mempunyai alasan untuk mempunyai perasaan afinitas yang tinggi terhadap masyarakat Indonesia yang lebih luas.

Anak-anak Tionghoa tahu bahwa mereka tidak mudah masuk Universitas, tidak mudah untuk menjadi pegawai negeri, tidak mudah berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya mereka terpaksa untuk mencari pergaulan di antara sesama mereka turunan Tionghoa karena pintu untuk berbaur juga tidak terbuka lebar bagi mereka.

Rasa kereasingan ini jelas tidaklah merupakan suatu faktor yg sehat bagi perkembangan anak-anak muda. Usaha pembauran acapkali hanyalah bersifat usaha penanggalan ciri-ciri serta nilai-nilai budaya Tionghoa saja, tanpa diikuti atau dibarengi dengan penerimaan ke dalam suatu kelompok yang lebih besar. Keadaan ini di antara anak-anak muda jelas akan menimbulkan frustrasi yang kemudian menghasilkan tindakan-tindakan destruktif baik terhadap masyarakat pada umumnya atau terhadap dirinya sendiri. Keadaan di mana nilai-nilai budaya sesuatu golongan masyarakat dirong-rong, secara sengaja ataupun tidak, akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan psikologis dan pada akhirnya tidak akan menguntungkan siapapun juga.

Penerimaan dan Penolakan. Sejak beberapa waktu telah beredar suatu tape cassette yang berisikan lelucon-lelucon mengenai keanehan berbagai suku Indonesia (6).

Sebenarnya lelucon-lelucon ini merupakan lelucon rasial tetapi semua orang, termasuk yang ditertawakan, tertawa juga mendengarnya.

Yang menarik ialah bahwa cassette yang mencemoohkan begitu banyak suku tidak memperagakan satu leluconpun mengenai orang-orang Tionghoa. Seakan-akan mereka tidak termasuk dalam pemandangan bumi Indonesia ini.

Penolakan bentuk halus ini juga ada bentuknya yang lebih kasar.

Seorang keturunan Tionghoa akan lebih sering dimintai pungli dari pada seorang pribumi umpamanya. Pada kebalikannya seorang keturunan Tionghoa juga lebih cepat beranggapan bahwa ia harus membayar uang jasa tidak resmi. Secara terang-terangan atau secara tersembunyi banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai semacam kwata bagi orang-orang keturunan Tionghoa. Huru hara yang ditujukan terhadap golongan inipun bukanlah hal yang jarang kita temui di Indonesia.

Pada pihak lain, selayang pandang, kita bisa juga melihat bahwa ada perubahan dalam perhubungan pribumi non pribumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia walaupun kita tidak banyak mempunyai data yang cukup untuk menggambarkan keadaan ini dengan jelas. Kelihatannya lebih banyak anak-anak golongan Tionghoa yang masuk di sekolah-sekolah yang dulunya hampir khusus dikunjungi anak-anak pribumi. Kelihatannya juga bahwa bertambah banyak lembaga yang secara tradisional menghususkan diri bagi golongan Tionghoa membuka pintunya dan dimasuki oleh orang-orang pribumi.

Gejala-gejala seperti ini memang memberi harapan tetapi belum banyak artinya. Kita tetap melihat bahwa di sekolah-sekolah anak-anak pri tidak begitu bercampur dengan anak-anak non-pri. Sedangkan di gereja-gereja yang secara tradisional dan keyakinan tidak membuat perbedaan diantara para anggotanya, kecanggungan dalam hubungan ini tetap berlangsung.



Kalau pembauran hanya diartikan sebagai kontak fisik saja maka memang banyak kemajuan yang telah dicapai terutama di lembaga-lembaga Kristen baik Protestan atau Katolik. Kalau yang dimaksud dengan pembauran ialah penerimaan yang timbal balik oleh golongan pri dan non pri maka boleh dikatakan bahwa proses pembauran baru berjalan pada suatu tingkat yang dangkal saja.

### III. PEMBAURAN DAN PENDIDIKAN .

#### Fungsi Pendidikan.

Pendidikan berfungsi untuk meneruskan nilai-nilai dan pengetahuan dari generasi yang satu ke generasi yang lain; pendidikan berfungsi untuk melakukan nilai-nilai dan pengetahuan yang ada dan terakhir pendidikan berfungsi untuk menciptakan nilai-nilai dan pengetahuan yang baru.

Dilihat dari segi ini maka pendidikan dapat dianggap sebagai jalur yang paling tepat untuk mencapai pembauran. Kalau kita memang benar-benar mempraktekkan nilai-nilai Panca Sila dan benar-benar mempraktekkan pengetahuan kita mengenai hubungan antara golongan dan ilmu kebudayaan bukankah kita telah dapat mengatasi sebagian besar dari persoalan kita ini ?. Kalau kita dapat membina nilai-nilai baru yang dapat mengalahkan pikiran-pikiran stereotipe mengenai satu dan yang lain dan kalau kita dapat mempelajari lebih lanjut perbedaan-perbedaan yang ada diantara kedua golongan ini dan bisa menghasilkan suatu hubungan budaya yang baru berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika bukankah nanti anak-anak kita bisa menganggap persoalan pembauran selesai dengan tuntas ?.

Sayangnya ialah bahwa dunia pendidikan justru merupakan salah satu arena pertarungan. Bagi suatu masyarakat dalam pembangunan maka dunia pendidikan merupakan jalan utama untuk mobilitas ke atas, suatu jalan untuk mencapai hasil pembangunan. Justru karena sarana pendidikan ini terbatas maka pertarungan bagi tempat dalam dunia pendidikan merupakan suatu kompetisi yang tajam. Ada suatu ketakutan bahwa kalau semua pintu lembaga pendidikan dibuka luas bagi semua orang dan hanya angka yang menentukan penerimaan maka lembaga-lembaga pendidikan kita akan dimonopoli oleh orang-orang non pri.

Dilemma kita dalam dunia pendidikan ialah bahwa kalau kita konsekwen dalam usaha pembauran ini maka semua hambatan harus kita hilangkan ; kita harus memperlakukan semua warga negara Indonesia berdasarkan norma yang sama tanpa memperdulikan konsekwensi-konsekwensinya kalau kita memang mau mencapai pembauran rasial.

Pada pihak lain pembauran rasial tidaklah berarti pembauran sosial ekonomis, Terlepas dari persoalan pri dan non pri lembaga-lembaga pendidikan Indonesia harus memberi perhatian khusus kepada golongan-golongan yang kurang mampu. Kalau tidak, dengan pembangunan yang berjalan yang begitu cepat, kita akan melihat polarisasi yang akan bertajam. Pembauran di dunia pendidikan mungkin adil dari segi hukum tetapi tidak adil dari segi sosial ekonomis.

#### Yang mungkin dicapai oleh lembaga pendidikan.

Hasil yang mungkin dicapai oleh dunia pendidikan sebenarnya sangat terbatas dalam jangka pendek: Dalam lingkungan dan suasana sekolah anak-anak dapat diperkenalkan kepada nilai-nilai yang sama dan taraf pengetahuan yang sama.

Saya katakan disini diperkenalkan karena agak sukar untuk mengharapkan bahwa pendidikan sekolah saja akan dapat mengubah jalan pemikiran seseorang padahal keluarga yang memainkan peranan yang terpenting dalam pembentukan watak seorang anak. Namun, hasil yang sedikit inipun sudahlah merupakan kemajuan.

Dalam konteks ini, pengajaran dan pemakaian Bahasa Indonesia yang baku memegang peranan pokok. Bahasa sebagai alat komunikasi bukanlah merupakan alat saja tetapi juga mewakili nilai-nilai dan pandangan budaya sesuatu masyarakat. (Bahasa Inggris hanya mengenal kata YOU dan THOU, Bahasa Indonesia mempunyai banyak kata untuk orang ke dua).

Dengan terbesarnya bahasa Nasional maka kita juga membangun suatu kerangka hubungan budaya yang didasarkan atas kesamaan bahasa. Pada hakekatnya, ini saja sudah merupakan suatu kemajuan yang besar sekali : pemakaian bahasa Indonesia yang baku merupakan faktor integrasi yang sangat kuat yang dapat memperkokoh kesatuan seluruh bangsa Indonesia.

#### Keterbatasan Dunia Pendidikan .

Sebenarnya, peranan pendidikan dalam proses pembauran tidaklah sebesar yang umum disangka. Tentu saja kalau kita mengartikan pembauran hanya sebagai penutupan sekolah-sekolah yang dulunya semata mata melayani anak-anak keturunan Tionghoa dan menggantikannya dengan sekolah di mana ada anak-anak pribumi dengan jumlah yang proporsional maka dengan sendirinya pembauran sudah tercapai dengan sepotong surat keputusan saja. Sasaran ini hanyalah suatu sasaran yang dangkal dan bersifat sementara dan tidak bisa menjamin pembauran yang lebih mendalam dan prinsipil.

Peran Lembaga pendidikan dalam proses pendidikan terbatas karena dunia pendidikan bukanlah merupakan variable independen, variable yang menentukan dalam proses pembauran, tetapi justru merupakan variable independen, variable yang ditentukan oleh variable-variable lainnya. Justru dunia pendidikan menjadi salah satu barang rebutan dalam masyarakat Indonesia dan dimana sarana pendidikan masih merupakan barang langka maka lembaga pendidikan bukan merupakan jalan ke luar tetapi merupakan kancah pergolakan atau salah satu penghambat bagi proses pembauran itu sendiri.

Yang menjadi penentu pokok dalam persoalan ini ialah keadaan umum ekonomi Indonesia sendiri. Di antara begitu banyak faktor pemisah antar golongan pri dan non pri, ekonomi merupakan salah satu pemisah yang menonjol. Persoalan ekonomi bukanlah merupakan persoalan ras tetapi merupakan persoalan kelas ekonomi, hanya saja dalam hal ini garis pemisah ekonomi diperkuat pula oleh garis perbedaan ras, sering juga oleh garis agama, budaya dan tampan fisik. Dengan demikian atribut kelainan mempunyai sifat yang akumulatif dan convergent dalam hal perbedaan pri dan non pri. Golongan Tionghoa bukanlah merupakan golongan kuasa yang dominan di Indonesia tetapi mereka merupakan golongan yang menyolok sehingga demikian mereka menjadi sasaran yang mudah bagi segala frustrasi masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan frustrasi masyarakat semua berada di luar kawasan dunia pendidikan, walaupun masyarakat mempunyai frustrasi mengenai sistim dan sarana pendidikan Indonesia itupun bukanlah dalam kewenangan kita untuk mengatasinya secara tuntas.

Kita terpaksa mengadakan pembatasan-pembatasan dalam penyediaan sarana pendidikan bagi anak Indonesia baik yang pri maupun non pri karena keadaan ekonomi kita memang belum sanggup untuk melayani semua kebutuhan. Memang ada lembaga pendidikan yang berat sebelah terhadap anak-anak pri.

Hal ini bukanlah disebabkan oleh suatu prasangka yang prinsipil tetapi hanyalah karena kekurangan sarana saja. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam keadaan keterbatasan sarana lembaga-lembaga pendidikan justru menjadi salah satu penghambat dari azas-azas pembauran.

Bidang pendidikan hanyalah salah satu dari faktor penunjang dalam proses pembauran dan juga bukan yang terpenting.: Hal-hal yang menentukan seperti persoalan ekonomi, keteguhan hukum, penambahan sarana pendidikan semuanya ditentukan di luar bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal inilah maka makalah ini lebih menekankan keterbatasan dunia pendidikan daripada menonjolkan potensi dunia pendidikan agar dengan demikian dunia pendidikan Indonesia jangan dibebani dengan pengharapan yang tidak sepadan dengan kapasitasnya yang sesungguhnya.

#### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip atau ideal dari Bhinneka Tunggal Ika bukanlah suatu hal yang mudah diterapkan dalam praktek. Penekanan yang terlalu keras pada pola Bhinneka bisa saja membawa perpecahan dalam tubuh kita, penekanan yang berlebihan atas pola Tunggal akan menuju kepada suatu mass-society dimana kekayaan budaya yang dihasilkan oleh keanekaragaman budaya ini akan hilang dan membuat kehidupan nasional sangat membosankan dan lesu.

Kalau kita beranggapan bahwa ke-Tunggal-an kita memang cukup untuk menampung ke-Bhinneka-an maka sebenarnya tidak ada alasan yang prinsipial untuk menolak kelompok budaya Tionghoa sebagai salah satu batu permata pada mahkota budaya Indonesia.

Perbedaan antara seorang Jawa non pri dan seorang Jawa pri tidak lebih besar dari, katakanlah, perbedaan antara seorang Jawa pri dari Solo dengan seorang Batak pri dari Balige.

Menghilangkan ciri-ciri budaya sesuatu kelompok tidak akan berarti bahwa oknum-oknum tersebut dengan serta merta akan mengambil alih ciri-ciri budaya kelompok lain. (Perlu dipikirkan dengan kelompok manakah seorang keturunan Tionghoa harus mengabdikan diri: Dengan orang Jawa? Dengan orang Sentani?)

Mencheruskan atau memecilkan arti ciri-ciri budaya sesuatu golongan hanyalah akan menyebabkan anomie, perasaan keasingan dan kehilangan pedoman, dan hanya akan menghasilkan gangguan gangguan kemasyarakatan saja.

Garis-garis pemisah antara orang-orang pribumi Indonesia pada umumnya tidaklah bersifat convergent atau akumulatif tetapi bersifat divergent sehingga dua orang pribumi Indonesia, darimana saja mereka berasal bisa saja mempunyai suatu faktor kesamaan. Dalam hubungan antara manusia pribumi dan non pribumi kerap kali garis-garis ini saling memperkuat sehingga ada kelompok keturunan Tionghoa yang betul-betul merupakan golongan marginal dalam masyarakat Indonesia.

Makalah ini berpegang pada prinsip bahwa di negara kita ini hanya ada dua macam warga negara saja : yakni warga negara Indonesia dan bukan warga-negara Indonesia dan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dan patut diperlakukan sama secara hukum. (7)

negara Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dan patut diperlakukan sama secara hukum (7)

Ketegasan hukum dan kebijaksanaan umum sedikit banyak akan dapat mengimlangi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang ingin mempertahankan status-quo antara golongan pri dan non pri. Implikasi dari sikon ini kiranya agak berat bagi dunia pendidikan dimana terdapat persaingan yang berat bagi sarana yang sangat terbatas jumlahnya. Namun, jika kita berpegang teguh pada prinsip kesamaan hak dan kesamaan martabat sesama warga negara Indonesia maka peraturan-peraturan diskriminatif harus dihapuskan. Lagi pula setiap tindakan diskriminatif hanyalah akan mempersulit proses pembauran itu sendiri.

Pada akhirnya, karena perscelan pembauran di dunia pendidikan hanyalah merupakan pencerminan dari perscelan ini dalam masyarakat Indonesia pada umumnya maka tidaklah bisa diharapkan bahwa sistim pendidikan Indonesia memegang peranan yang menentukan dalam proses pembauran ini kecuali jika sarana pendidikan itu sendiri, baik sarana fisik maupun sarana manusia, diperluas dengan dramatis. Sumbangan lembaga-lembaga pendidikan Indonesia dalam proses pembauran hanyalah merupakan penambah dari usaha-usaha di luar bidang pendidikan.

Dengan bertambahnya laju proses pembangunan Indonesia, dimana pilihan-pilihan bagi warga negara Indonesia akan bertambah, maka frustrasi masyarakat akan berkurang sehingga kebutuhan akan suatu sasaran pengganti juga akan menurun dan dengan demikian laju pembauran bisa diharapkan bertambah cepat pula.

Rekomendasi. Malaurun makalah ini berpendapat bahwa peranan sekolah/lembaga pendidikan dalam proses pembauran terbatas, namun dalam keterbatasan ini banyak juga yang dapat dilakukan oleh sekolah.

Untuk menaikkan efektivitas sekolah dalam hal pembauran maka kami mengajukan beberapa rencana :

1. Agar sekolah-sekolah pembauran, sekolah dimana terdapat persentase murid non pri yang melebihi 30%, mendapat bantuan khusus untuk memperbaiki penyajian mata pelajaran Bahasa Indonesia, sejarah, PPD, Ilmu Bumi dan kegiatan kebudayaan.
2. Bahwa nilai-nilai budaya Tionghoa juga diticarakan dalam mata pelajaran ini dan dengan demikian peralihan ke alam pemikiran Indonesia bisa berlangsung tanpa menyebabkan anomie.
3. Agar guru-guru yang bertugas di sekolah pembauran mendapat penataran khusus dalam budaya dan sejarah Tionghoa supaya mereka lebih efektif menghadapi masyarakat keturunan Tionghoa.
4. Agar sekolah-sekolah pembauran dengan aktif mengadakan acara-acara yang menyangkut orang tua murid pri dan non pri.
5. Agar dalam hubungan dengan para pelajar, apalagi di tingkat SD, para guru tidak menekankan akan kelainan murid-murid non pri melainkan menekankan kearungan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
6. Agar dimana mungkin, sekolah-sekolah yang mempunyai murid non pri dalam persentase tinggi bekerja sama dengan sekolah-sekolah lainnya dalam hal penerimaan murid.
7. Agar sekolah-sekolah pembauran dan sekolah-sekolah yang mempunyai persentase murid non pri yang tinggi bekerjasama dengan satu sekolah dengan persentase non pri yang rendah dalam kegiatan-kegiatan sekolah.

Jakarta, 27 Oktober 1981



dengan satu sekolah dengan persentase non pri yang rendah dalam dalam kegiatan-kegiatan sekolah.

Jakarta, 27 Oktober 1981.

CITATAN BAKI.

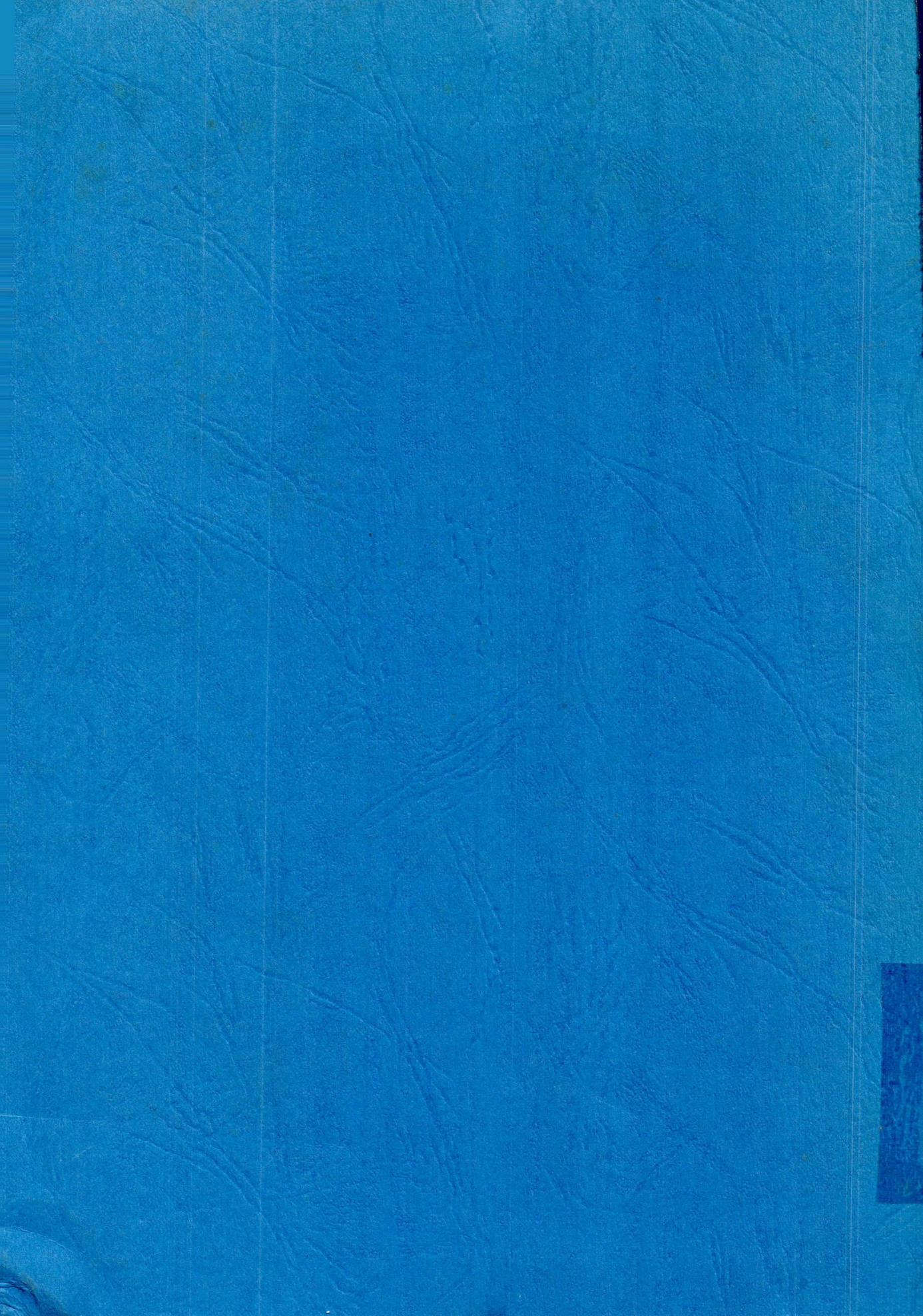
1. Arnold M. Rose, "Race and Ethnic Relations", di Robert K. Merton dan Robert A. Nisbet, Contemporary Social Problems, (New York/Chicago/Burlingame : Harcourt, Brace & World, Inc., 1966), hal. 426 et. passim.
2. George C. Homans, The Human Group, (New York : Harcourt, Brace and Co., 1950), hal. 111,113.
3. Lihat umpamanya, Donald Earl Millmott, The Chinese of Semarang : A Changing Minority in Indonesia, (Ithaca, New York : Cornell University Press, 1960) hal. 9.
4. G. William Skinner, "The Chinese Minority", di Ruth T. Mc Vey, (ed.), Indonesia, (New Haven : Human Relations Area Files, Inc., 1963) hal. 97.
5. Lihat pembicaraan mengenai stereotype di J.L. Simmons, "Public Stereotypes of Deviants", di Ephraim H. Mizruchi, The Substance of Sociology, (New York : Appleton-Century Crofts, 1967) hal 274.
6. Di bawah Sinar Lampu Petromaks, tape, Prambors  
Bandingkan :

7. Ketetapan MPR nomor IV/1978 dan Resolusi MPRS Nomor III/Res Res./MPRS/1966 pasal 4.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

Catatan : Kepustakaan mengenai hubungan antar kelompok, akibat diskriminasi dan persoalan lain mengenai hubungan minoritas sangat luas walaupun belum banyak teori-teori mengenai hal ini yang tuntas.

1. H.M. Elalock, Jr., Toward a Theory of Minority Group Relations, (New York : John Wiley & Sons, 1967).
2. Marshall P. Clinard, Anomie and Deviant Behavior, (New York: The Free, 1964).
3. E. Franklin Frazier, The Negro in the United States, (New York: Mc Millan, 1957).
4. Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, Political Power and Communications in Indonesia, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Pres, 1978) terutama bab. I & II.
5. Ruth T. McVey, Indonesia, (New Haven: Human Relations Area Files Inc., 1963).
6. Robert K. Merton dan Robert A. Nisbet, Contemporary Social Problems, (New York/Chicago/Purlingame: Harcourt, Brace, and World, Inc., 1966).
7. Ephraim H. Mizruchi, The Substance of Sociology, ( New York : Appleton, Century, Crofts, 1967)
8. Donald E Willmetts, The Chinese of Semarang, ( Ithaca, New York : Cornell University Press, 1960 )
9. Crawford Young, The Politics of Cultural Pluralism, ( Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 1976 ).



XI. 3  
Perpustakaan  
Jenderal K  
370  
LA  
I